

**RESPON TIONGKOK TERHADAP PERDAGANGAN SENJATA
AMERIKA SERIKAT-TAIWAN PADA MASA PEMERINTAHAN
PRESIDEN BARACK OBAMA (2009-2017)**

(Skripsi)

Oleh

FITRAH JAYA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

RESPON TIONGKOK TERHADAP PERDAGANGAN SENJATA AMERIKA SERIKAT-TAIWAN PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN BARACK OBAMA (2009-2017)

Oleh

FITRAH JAYA

Hubungan AS-Tiongkok menjadi isu yang cukup menarik dalam fokus dunia kontemporer ini. Kedua negara ini bisa berhubungan baik dalam ekonomi namun, terdapat pergeseran isu antara keduanya yang kemudian menjadi hal yang menarik seperti perdagangan persenjataan konvensional yang dilakukan AS terhadap Taiwan. Isu ini menjadi menarik ketika sebelumnya hubungan AS-Tiongkok cenderung membaik bahkan Tiongkok membuat kebijakan luar negeri yang bertujuan membantu AS dalam menangani krisis ekonomi dengan membeli surat obligasi/surat utang milik AS di tahun 2008. Namun disisi lain, hubungan AS-Taiwan nyatanya masih terus terjalin bahkan tetap melakukan kerja sama perdagangan senjata di bawah Undang-Undang TRA (*Taiwan Relation Act*). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk respon Tiongkok yang diberikan terhadap AS yang melakukan penjualan senjata ke Taiwan dan menjalin hubungan dengan Taiwan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang erat dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dan dokumentasi, serta teknik analisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan Teori Respon, Politik Internasional, dan Konsep *Balance of Threat*.

Hasil penelitian yang diperoleh yakni bahwasanya bentuk respon yang dilakukan oleh Tiongkok yakni menolak perdagangan senjata AS terhadap Taiwan dan berdasarkan konsep *Balance of Threat* milik Stephen M. Walt adalah *bandwagoning* terhadap Amerika Serikat.. Hal ini dikarenakan Tiongkok tidak memiliki aliansi yang mumpuni dalam melakukan *balancing* terhadap AS terutama di kawasan Asia-Pasifik

Kata Kunci : Hubungan AS-Tiongkok, Taiwan, Tiongkok, Amerika Serikat dan Perdagangan Senjata

ABSTRACT

RESPONSE OF CHINA AGAINST U.S.-TAIWAN ARMS TRADE DURING PRESIDENT BARACK OBAMA ADMINISTRATIONS 2009-2017

By

FITRAH JAYA

U.S.-China Relation is becoming quite an interesting issue in this contemporary world focus. The two countries are able to relate well in the economy, however, there is a shift in issues between the two which then becomes an interesting like the conventional arms trade conducted by the US against Taiwan. This issue becomes interesting when previously US-China relations tended to improve even China made foreign policy aimed at helping the US in dealing with the economic crisis by buying US Treasury / bonds in 2008. But on the other hand, US-Taiwan relations in fact continued even maintaining arms trade cooperation under the TRA (Taiwan Relation Act). Therefore, this study aims to look at the form of response China has given to the US, which sells weapons to Taiwan and establishes relations with Taiwan.

This study uses a descriptive type of research that is closely related to a qualitative approach with data collection techniques used are literature and documentation studies, as well as analysis techniques with data reduction, data presentation and drawing conclusions. This research uses Theory of Response, International Politics, and the Concept of Balance of Threat.

The findings of this research are that the form of response conducted by China is refuse U.S.-Taiwan Arms Trade and based on Stephen M. Walt's Balance of Threat concept is bandwagoning to the United States. This is because China does not have a capable alliance in balancing the US, especially in the Asia-Pacific region

Keywords: US-China relations, Taiwan, China, United States and Arms Trade

**RESPON TIONGKOK TERHADAP PERDAGANGAN SENJATA
AMERIKA SERIKAT-TAIWAN PADA MASA PEMERINTAHAN
PRESIDEN BARACK OBAMA (2009-2017)**

Oleh

FITRAH JAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hubungan Internasional**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **RESPON TIONGKOK TERHADAP
PERDAGANGAN SENJATA AMERIKA SERIKAT-
TAIWAN PADA MASA PEMERINTAHAN
PRESIDEN BARACK OBAMA (2009-2017)**

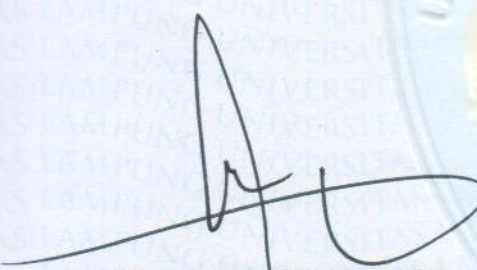
Nama Mahasiswa : **Fitrah Jaya**

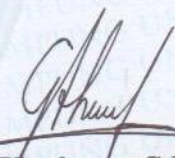
No. Pokok Mahasiswa : **1516071074**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

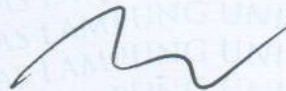
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006


Gita Karisma, S.IP., M.Si.
NIP 19870128 201404 2 001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

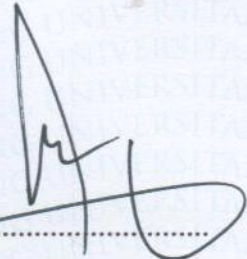


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

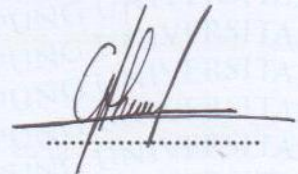
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

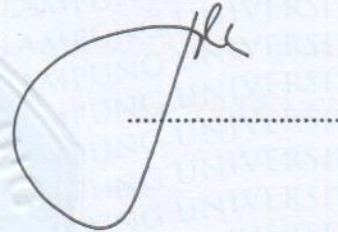
Ketua : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.



Sekretaris : Gita Karisma, S.IP., M.Si.



**Penguji
Bukan Pembimbing: Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 02 Oktober 2019



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2019
Yang membuat pernyataan,



Fitrah Jaya
NPM. 1516071074

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Jakarta pada 10 September 1997 sebagai anak pertama dari pasangan keluarga Bapak Muchlis dan Ibu Martati.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Tg. Batu Majene pada tahun 2003-2009, dilanjutkan ke SMP Negeri 3 Majene pada tahun 2009-

2012, dilanjutkan ke SMA Negeri 2 Majene pada tahun 2012-2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur Ujian Mandiri Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) pada tahun 2015.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Penulis menjabat sebagai Kepala Departemen *Academic Affairs Pengurus* Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (PHMJHI) tahun 2016/2017. Kemudian Penulis menjabat sebagai Kepala Departemen *External Relation & Business Development* Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (PHMJ HI) tahun 2017/2018. Selain itu Penulis juga sempat mengikuti *International Model United Nation* (I-MUN) sebagai delegasi Asian Regional Forum (ARF) yang diadakan di Universitas Indonesia pada Tahun 2018.

MOTTO

"Memento Mori"

"The best pleasure in life is doing what people say you cannot do"

"Stay Golden Ponyboy !!"
(John Cena)

"There is no talent, this is hardwork, this is an obsession, talent does not exist, we are equals as human beings."
(Conor McGregor)

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur
kupersembahkan karya sederhana ini untuk

Kedua Orang Tuaku

Bapak Muchlis dan Ibu Martati

Yang senantiasa memberikan kasih dan sayang
dan tak lupa selalu mendoakan yang terbaik bagi anak-anaknya

Adikku Suci Mantika Putri

Bapak Drs. H. Nursyirwan, M.M dan Ibu Hj. Mutiarani

Terima Kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan motivasi
moral dan materil yang tiada henti-hentinya.

serta Almamater tercinta **Universitas Lampung**,
Tempatku mengenal warna baru dan bermetamorfosa

SANWACANA

Alhamdulillahil'alam, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Respon Tiongkok Terhadap Perdagangan Senjata Amerika Serikat-Taiwan Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama (2009-2017)” ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembacanya dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada ilmu hubungan internasional.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat bijaksana dan yang dengan kesabarannya telah membimbing penulis

4. Ibu Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas kesediaan dan kesabarannya dalam memberikan arahan, bimbingan, saran, dan kritik kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dosen Pembahas / Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna bagi skripsi ini.
6. Seluruh jajaran Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Bu Ari, Mas Gara, Mas Hasbi, Mas Tyo, Mas Indra, Mas Nizar, Mba Tiwi, Mba Atta, Mba Pipit, Mba Gita Dj, Mba Tety, Mas Fredrik, Mba Nisa, Mba Ayu. Terimakasih atas ilmu, bantuan dan keceriaan baik di dalam maupun luar perkuliahan.
7. Laila Novita Sari, S.Si. Terima kasih telah memberi warna baru selama masa perkuliahan dan pemberi semangat bagi penulis.
8. I Wayan Sulpai, S.Hub.Int. selaku kakak yang terus memberikan motivasi dan tempat berbagi keluh kesah selama berkuliah serta tidak sungkan meluangkan banyak waktunya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Geraldo Marcellino, tetangga sekaligus teman pertama penulis sejak berkuliah di Lampung yang senantiasa membantu penulis, dan kawan seperjuangan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
10. Teman Seperjuangan dan Mentor Penulis, Arief Cahyo B, Beltsazar Septian, Lutfijar H, Ahmad Albin , Bang Eja, Bang Can, Prajody Y, Arief Ramadhan.
11. Seluruh teman-teman Strata-1 Hubungan Internasional angkatan 2015 tanpa terkecuali, semoga kesuksesan dan keberuntungan selalu menyertai kita semua.
12. Retno W, Wita N, Hizkia S, Anindya N. Rahmi, Christine, Melinda Putri, Malebi, Pio, Agung, Hanu R, Mela, Dinda, Olvy, Ijul, Boni, Revih, Devita, Riris, Clara, Ica, Kent, Firly dll.
13. Teman-teman KKN Tematik Universitas Lampung Periode Juli Tahun 2018, yaitu Mas Sigit, Ikhsan, Resti Wilia, Anggun Marantika dan Fia Asyisyifa. Terimakasih telah menjadi teman 32 hari hidup bersama dan hingga saat ini masih berteman baik.

14. Kepada PHMJ HI Unila 2016/2017 dan PHMJ HI Unila 2017/2018 yang telah memberikan dinamika dalam proses kehidupan penulis.
15. Seluruh pihak yang memberikan doa, dukungan dan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan dedikasi yang telah diberikan oleh semua pihak yang membantu dalam proses yang dijalani oleh penulis.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2019
Penulis,

Fitrah Jaya

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	21
2.2.1 Respon.....	21
2.2.2 Politik Internasional	22
2.2.3 Balance of Threat	25
2.3 Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Tipe Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Teknik Keabsahan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
IV. GAMBARAN UMUM.....	35
4.1 Hubungan Bilateral Amerika Serikat-Tiongkok	39
4.1.1 Kebangkitan Partai Komunis di Tiongkok.....	40
4.1.2 Diplomasi Pingpong (AS-Tiongkok)	42
4.1.3 <i>Full Diplomatic Ties Sino-U.S. & One China Policy</i>	46
4.1.4 Hubungan AS-Tiongkok dalam Isu Taiwan 1978-2009	49
4.1.5 Bipolaritas Amerika Serikat – Tiongkok	52

4.2 Hubungan Amerika Serikat-Taiwan	58
4.2.1 Taiwan Relation Act	62
4.2.2 The Six Assurances	63
4.3 Kerja sama Perdagangan Senjata Amerika Serikat-Taiwan.....	67
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	76
5.1 Dinamika Hubungan AS-Tiongkok pada masa Presiden Barack Obama..77	
5.1.1 Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Tiongkok dalam kerangka <i>Asia Pivot</i>	79
5.1.2 Kebijakan Tiongkok terhadap AS dalam U.S-China Strategic and Economic Dialog (S&ED) / G-2 (Group of two)	87
5.2 Respon Tiongkok terhadap perdagangan Senjata AS-Taiwan.....	93
5.3 Bentuk Respon Tiongkok terhadap Ancaman Amerika Serikat	112
VI. PENUTUP	122
6.1 Kesimpulan	122
6.2 Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Daftar Negara Importir dan Eksportir Senjata.....	5
2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
5.2 Rincian penjualan senjata AS ke Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Obama	94
5.3 Ringkasan Bentuk Respon Tiongkok terhadap Perdagangan AS-Taiwan Tahun 2009-2017.....	108
5.4 Perbandingan Persenjataan Amerika Serikat-Tiongkok Tahun 2017.....	115
5.5 Jumlah Personil di Pangkalan militer AS di 6 Negara Asia-Pasifik Tahun 2017	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Data Volume Perdagangan Senjata Sejak 1950-2017	3
2.3 Kerangka Pikir.....	32
4.1. Data Pertumbuhan GDP Tertinggi di Dunia Sejak 1978-2017	54
4.2. Anggaran Pertahanan Militer Tiongkok Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir	56
4.3 Nilai perdagangan senjata AS ke Taiwan 1990-2017 (Miliar US\$).....	69
5.1. Data Pertumbuhan GDP Tertinggi di Dunia Sejak 1978-2017	89

DAFTAR SINGKATAN

APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ARF	: <i>Asian Regional Forum</i>
AS	: Amerika Serikat
AS-USSR	: <i>United States- Union of Soviet Socialist Republics</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATT	: <i>Arms Trade Treaty</i>
CPC	: <i>Communist Party of China</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
G-2	: <i>Group of Two</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
MAAG	: <i>Military Assistance Advisory Group</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PLA	: <i>People's Liberation Army</i>

PRC	: <i>People's Republic of China</i>
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
S&ED	: <i>Strategic and Economic Dialog</i>
SEATO	: <i>Southeast Asian Treaty Organization</i>
SIPRI	: <i>Stockholm International Peace Research Institute</i>
TRA	: <i>Taiwan Relation Act</i>
U.S.	: <i>United States</i>
USSR	: <i>Union of Soviet Socialist Republics</i>
U.S.-ROC	: <i>United State-Republic of China</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Hubungan AS-Tiongkok menjadi isu yang cukup menarik dalam fokus dunia kontemporer ini. Kedua negara ini bisa berhubungan baik dalam ekonomi namun, terdapat pergeseran isu antara keduanya yang kemudian menjadi hal yang menarik seperti perdagangan persenjataan konvensional yang dilakukan AS terhadap Taiwan. Perdagangan senjata konvensional dalam dunia internasional merupakan suatu bentuk kebijakan yang umum dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan. Perdagangan senjata sama seperti halnya perdagangan-perdagangan lainnya, merupakan proses jual-beli yang didasarkan atas kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Perbedaannya hanya terletak pada komoditas yang diperdagangkan yaitu senjata. Perdagangan Senjata didefinisikan oleh SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) sebagai perdagangan barang dan jasa militer kepada pihak konsumen, termasuk perdagangan domestik maupun mancanegara yang meliputi senjata konvensional hingga teknologi khusus militer.

Sales of military goods and services to military customers, including both sales for domestic procurement and sales for export. Military goods are military-specific equipment and do not include general-purpose goods, such as oil, electricity, office computers, uniforms

*and boots. Military services are also military-specific. They include technical services, such as information technology, maintenance, repair and overhaul, and operational support.*¹

Pada era kontemporer, Perdagangan senjata dilakukan oleh negara yang berperan sebagai Eksporter dan Importer senjata. Laporan tahunan Institut Riset Perdamaian Internasional Stockholm (Stockholm International Peace Research Institute/SIPRI) mencatat bahwa perdagangan senjata konvensional telah dilakukan oleh negara terutama paska perang dunia I atau sejak tahun 1950.²

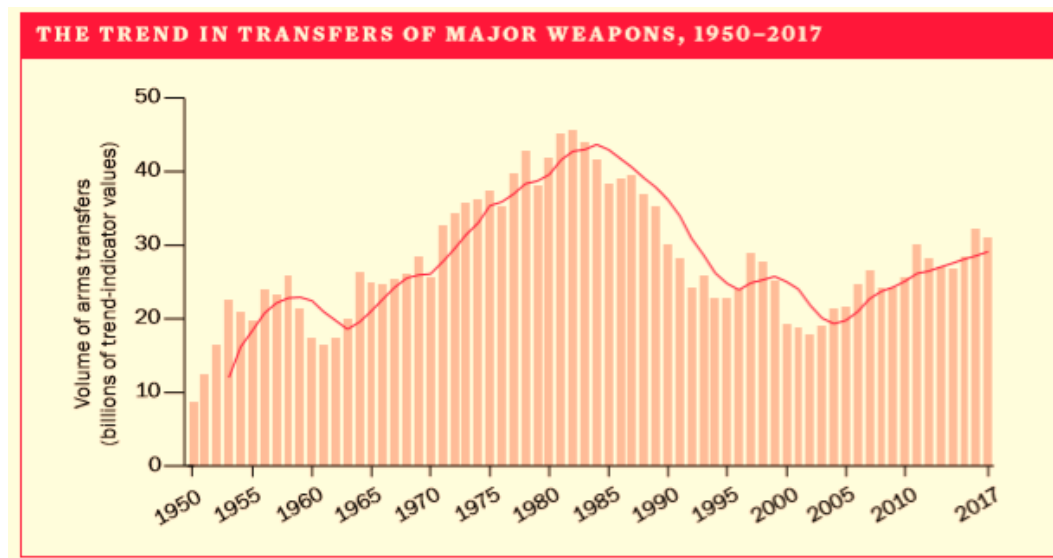
Dalam perdagangan senjata terdapat dua kategori perdagangan, yaitu *legal* dan *illegal*. Perbedaan diantara keduanya terletak pada level kebijakan. Perdagangan senjata *legal* melibatkan negara baik secara aktif maupun pasif, serta mematuhi hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Sedangkan perdagangan senjata secara *illegal*/gelap adalah sebaliknya, terjadi secara bebas dengan tidak mengindahkan hukum yang berlaku. Legalitas suatu perdagangan senjata ditentukan oleh pihak yang menggunakan senjata tersebut sebagaimana yang diatur dalam *Arms Trade Treaty (ATT)*.

Arms Trade Treaty (ATT) merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang perdagangan senjata internasional yang sifatnya mengikat dan memiliki landasan hukum. ATT meregulasi dan membatasi perdagangan internasional dalam senjata konvensional. Perdagangan senjata yang dalam prosesnya meliputi ekspor, impor, *transit*, *trans-shipment*, hingga *brokering* harus berada dalam otoritas negara

¹ SIPRI Arms Industry Database yang di akses di <https://sipri.org/search/node?keys=definition+Arms+sales> pada 6 desember 2018

² Mark Bromley, dkk. "Recent Trends In The Arm Transfer", SIPRI Background Paper, April 2009. Hlm. 4

dan senjata yang dibeli tidak boleh digunakan untuk kejahatan kemanusiaan.³ Perjanjian mengenai perdagangan senjata konvensional (*Arms Trade Treaty*) telah disetujui oleh PBB sebagai langkah untuk membatasi dan mengawasi peredaran senjata konvensional dan penyalahgunaan senjata. Dalam ATT, jenis-jenis senjata konvensional yang diatur meliputi Tank, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang, rudal dan peluncur rudal, serta *Light Weapon* atau kelas ringan.⁴ Di bawah ini grafik volume perdagangan senjata konvensional sejak 1950-2017 ;



Gambar 1.1: Data Volume Perdagangan Senjata Sejak 1950-2017

Sumber : Sipri Yearbook 2018

Dalam grafik tersebut dijelaskan bahwa dalam rentang waktu 1950 hingga 2017, puncak perdagangan senjata konvensional terbesar dalam dunia internasional terjadi pada periode waktu 1975 hingga 1985 yakni masa Perang Dingin. Hal ini

³ Arms Trade Treaty Pasal 2(1) pdf , di akses pada <http://static.un.org/disarmament/ATT/> pada 20 november 2018

⁴ ATT Implementation Toolkit, di akses pada <http://static.un.org/disarmament/ATT/> 20 november 2018

terutama didorong oleh situasi perang dingin (*Cold War*) yaitu Amerika Serikat dan USSR saling bersitegang kemudian saling berlomba meningkatkan kapabilitas persenjataannya antara satu sama lain. Kemudian terjadi penurunan volume perdagangan senjata dari tahun 1985 secara terus-menerus hingga tahun 1996 sebesar 30 %. Namun pada rentang waktu tahun 2005 hingga 2017 volume perdagangan senjata perlahan-lahan terus meningkat bahkan peningkatan volume perdagangan senjata di tahun 2017 merupakan pencapaian tertinggi dengan kenaikan sekitar 15 % sejak era Perang dingin (Periode tahun 1980-1985).

Kenyataannya disatu sisi lima Eksporter atau pemasok senjata konvensional terbesar dalam dunia internasional adalah Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Jerman dan Tiongkok menyumbang 74 persen dari total volume global ekspor senjata utama. Sejak tahun 1950 Amerika Serikat dan Rusia (dulu Uni Soviet) serta beberapa Negara di Eropa Barat telah secara konsisten menjadi pemasok terbesar dan secara historis mendominasi daftar 10 pemasok teratas.⁵ Disisi lainnya lima importir senjata teratas adalah India, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan China, yang bersama-sama menyumbang 35 persen dari total impor senjata. Kawasan Asia dan Oceania adalah wilayah penerima utama, menyumbang 42 persen dari total volume global impor senjata utama hingga tahun 2017, diikuti oleh Timur Tengah yang menyumbang 32 persen.⁶ Berikut di bawah ini data tabel yang menunjukkan urutan eksporter dan importer senjata terbesar di dunia.

⁵ SIPRI Yearbook 2018 halaman 8 di akses pada <https://sipri.org/yearbook/summaries> tanggal 20 November 2018.

⁶ Ibid., hal 8.

Tabel 1.1 Daftar Negara Importir dan Eksportir Senjata

NEGARA-NEGARA EKSPOTIR DAN IMPORTIR SENJATA KONVENSIONAL TERBESAR DI DUNIA 2013-2017					
No.	Eksportir	Global Share %	No.	Importer	Global Share %
1.	USA	34	1	India	12
2.	Russia	22	2	Saudia Arabia	10
3.	France	6.7	3	Egypt	4.5
4.	Germany	5.8	4.	UAE	4.4
5.	China	5.7	5.	China	4.0
6.	UK	4.8	6.	Australia	3.8
7.	Spain	2.9	7.	Algeria	3.7
8.	Israel	2.9	8.	Iraq	3.4
9.	Italy	2.5	9.	Pakistan	2.8
10.	Netherlands	2.1	10.	Indonesia	2.8

Sumber : Sipri Yearbook 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Amerika Serikat menjadi negara eksporter terbesar di dunia dengan persentase 34% penyebaran global dan menjadi eksporter no.1 di dunia sedangkan India menjadi negara importer terbesar di dunia dengan persentase 12 % penyebaran global. Tiongkok sendiri berada di urutan ke 5 sebagai importer senjata internasional dengan persentase 5,7% penyebaran global dan juga menduduki urutan ke-5 sebagai ekspoter senjata dengan persentase 4% penyebaran global.

Sebagai produsen terbesar senjata di dunia, Amerika Serikat (AS) banyak menjalin kerja sama perdagangan senjata di berbagai negara yang tersebar hingga lintas kawasan. Salah satunya yakni dinamika perdagangan senjata antara AS , Tiongkok dan Taiwan. Sesungguhnya AS telah lama memulai kerja sama dengan Taiwan. Sejarah mencatat hubungan AS- Taiwan bermula sejak perang Korea tahun 1950an. Pada masa Pemerintahan Presiden Harry Truman, Amerika Serikat melakukan perjanjian dengan Taiwan dalam pertahanan yang bertujuan untuk menanggulangi ancaman dari

Tiongkok. Beberapa diantaranya yakni perjanjian *United State-Republic of China (US-ROC) Mutual Defense Treaty* dan MAAG (*Military Assistance Advisory Group*) yang merupakan penempatan personel militer AS di Taiwan. Perjanjian *US-ROC Mutual Defense Treaty* merupakan perjanjian formal pertahanan bersama antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Taiwan. Perjanjian ini pada dasarnya bertujuan mencegah Tiongkok untuk menyatukan kembali Kepulauan Taiwan. Perjanjian ini dibuat pada Desember 1954 di Washington DC.⁷

Dalam perjanjian tahun 1954 ini Amerika Serikat dengan Taiwan, AS bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan Taiwan. AS memberikan bantuan kepada militer Taiwan, seperti sistem persenjataan canggih, dukungan perangkat lunak yang besar, serta mengerahkan beberapa pasukan militernya ke Selat Taiwan untuk menjaga keamanan Taiwan dari ancaman Tiongkok. Dengan adanya perjanjian ini posisi Taiwan berada dalam naungan AS.

Namun, pada masa Pemerintahan Richard Nixon, AS melakukan kebijakan normalisasi hubungan dengan Tiongkok. AS menandatangani *The Shanghai Communique* dengan Tiongkok yakni *Joint Statement* AS-Tiongkok yang berisikan bahwa AS mengakui *One China Policy*, yang intinya baik Taiwan dan Beijing merupakan satu kesatuan wilayah Tiongkok serta hanya ada satu Tiongkok pada tahun

⁷ United States Department of State. Historical Office. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. (1957), *American foreign policy. 1950–1955 basic documents.*, diakses pada <https://www.revolvy.com/page/Sino%252DAmerican-Mutual-Defense-Treaty> tanggal 10 november 2018

1972.⁸ Kemudian pada Januari tahun 1979 AS resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dengan kembali menandatangani *Communique* Kedua yang bertujuan menormalisasi hubungan AS-Tiongkok. Kedekatan hubungan AS-Tiongkok berdampak pada status hubungan AS-Taiwan yang berubah menjadi non-formal/tidak resmi setelah *US-ROC Mutual Defense Treaty* resmi diberhentikan.

Paska berhentinya *US-ROC Mutual Defense Treaty*, Pemerintah Amerika Serikat membuat Undang-Undang domestik melalui Kongres AS untuk menjaga hubungan dengan Taiwan yang dikenal dengan *Taiwan Relation Act* (TRA) yang dibuat setelah 4 bulan peresmian hubungan diplomatik AS-Tiongkok. Tujuan dibuatnya TRA yakni agar AS masih dapat melakukan kerja sama Non-formal dengan Taiwan demi menjaga keamanan dan mencegah tindakan agresif Tiongkok dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan sehingga hubungan AS-Taiwan masih dapat terjalin seperti hubungan perdagangan, Kebudayaan dan Hubungan non-formal lainnya.

Selama hampir tiga puluh satu tahun terakhir kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan tetap konsisten dengan tetap berkomitmen untuk setia dalam pelaksanaan *Taiwan Relations Act* melalui kerja sama bilateral AS-Taiwan meskipun non-formal. Salah satu bentuk kerja sama yang masih dilakukan yakni perdagangan senjata konvensional yang dikirimkan AS kepada Taiwan. Terakhir kali AS melakukan

⁸ Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Volume XVII, China, 1969–1972. 203. Joint Statement Following Discussions With Leaders of the People’s Republic of China. Office of the Historian. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v17/d203> di akses pada tanggal 10 november 2018

kesepakatan penjualan senjata militer ke Taiwan yakni pada masa Pemerintahan Barack Obama pada 2015.⁹

Pada tahun 2015, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyetujui proposal penjualan paket senjata ke Taiwan sebesar 1.85 miliar dollar. Paket tersebut terdiri dari misil Javelin, peralatan sistem komando MIDS, misil anti-Tank TOW 2B Aero, alat pendeteksi misil anti-kapal MK 15 Phalanx Block 1B Baseline, alat pertahanan udara Block I -92F MANPAD Stinger Missiles, kendaraan tempur dilengkapi machine guns *Assault Amphibious Vehicles*(AAVs); .50 Calibre M2 *machine guns*; 6 7.62mm M240 *machine guns* dll.¹⁰ Kebijakan yang dilakukan oleh AS tentunya menimbulkan pandangan buruk Tiongkok terhadap Amerika Serikat atas sikap yang cenderung tidak konsisten serta tidak menghargai Tiongkok.¹¹ Oleh karena itu menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana respon Tiongkok terhadap Amerika Serikat terutama setelah pembelian senjata oleh AS ke Taiwan. Hal ini tentu saja menjadi hal yang sensitif bagi Tiongkok yang masih menganggap Taiwan merupakan bagian dari Daratan utama Tiongkok. Kemudian apakah bentuk respon Tiongkok tetap stabil atautkah malah sebaliknya.

⁹<https://internasional.kompas.com/read/2011/09/27/14125032/china.cemaskan.transaksi.senjata.as-taiwan> diakses pada 30 Oktober 2018.

¹⁰ http://internasional.tvone.co.id/berita/view/34677/2010/03/19/abaikan_china_as_tetap_jual_senjata_ke_taiwan/. Diakses pada 20 november 2018

¹¹ Hal ini merupakan Isu yang sensitif bagi Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menyatakan menentang penjualan senjata senilai itu dari AS kepada Taiwan. Menurut Beijing, transaksi itu bisa merusak hubungan Tiongkok dengan AS. Tiongkok memandang bahwa kebijakan penjualan senjata militer terhadap Taiwan dan pemberian dukungan Politik terhadap wilayah tersebut sebagai bentuk pengakuan adanya kedaulatan independen di Taiwan.

Penelitian ini akan fokus pada Tahun 2009-2017 atau lebih tepatnya paska krisis ekonomi Amerika Serikat 2008-2009. Sebab, pada masa tersebut hubungan AS-Tiongkok cenderung membaik bahkan Tiongkok membuat kebijakan luar negeri yang bertujuan membantu AS dalam menangani krisis ekonomi dengan membeli surat obligasi/surat utang milik AS. Disisi lainnya hubungan AS-Taiwan nyatanya masih terus terjalin bahkan tetap melakukan kerja sama perdagangan senjata di bawah Undang-Undang TRA (*Taiwan Relation Act*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti merumuskan suatu pertanyaan penelitian yaitu “*Bagaimana Respon Tiongkok terhadap perdagangan senjata militer AS-Taiwan masa Pemerintahan Presiden Barack Obama (2009-2017) ?*”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjawab masalah mengenai ancaman dari perdagangan senjata AS-Taiwan terhadap Tiongkok pada tahun 2009-2017 dengan menganalisis bentuk respon yang berikan Tiongkok terhadap Amerika Serikat yang melakukan penjualan senjata ke Taiwan dan menjalin hubungan dengan Taiwan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi dalam fokus kajian keamanan internasional, kemudian untuk melihat respon Tiongkok terhadap perdagangan senjata AS-Taiwan.
2. Secara Praktis, Hasil dari penelitian ini secara Praktis dapat digunakan sebagai acuan guna melihat respon Negara dalam melihat ancaman dari negara lain serta pemilahan pengambilan keputusan untuk merespon ancaman yang dirasakan oleh negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai tahap awal dalam penelitian ini maka perlu untuk melihat penelitian sebelumnya dengan tema yang sama yang bertujuan untuk melihat perbedaan dan keunikan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian pertama berjudul, “Bipolarity and the Future of U.S.-China Relations”. Diterbitkan pada tahun 2018, ditulis oleh Richard Maher yang merupakan akademisi dari *European University Institute*.¹² Dalam jurnal ini dijelaskan tentang bipolaritas dan masa depan hubungan AS-Tiongkok dalam 2 dekade terakhir.¹³ Peningkatan *power* dan pengaruh Tiongkok telah menjadi aktor baru untuk menyaingi AS. Sebagai *Rising Power* dalam sistem internasional tentunya menjadikan Tiongkok sebagai pesaing baru Amerika Serikat. Kemudian pengaruh AS di Kawasan Asia Pasifik relatif lebih kecil dibanding Tiongkok.

¹² Maher, Richard. 2018. “Bipolarity and the Future of U.S.-China Relations” *.Political Science Quarterly* .Vol.133 No.3

¹³ Bipolaritas dapat dikaitkan dengan rentang hubungan yang jauh lebih luas antara dua kekuatan dominan. Bipolaritas dapat ditandai oleh pola kerja sama serta persaingan antara dua negara dominan. Sifat hubungan mereka sangat tergantung pada fitur kontingen seperti tingkat saling ketergantungan ekonomi dan keyakinan politik domestik seperti halnya pada struktur sistem internasional. Maher, Richard, Journal “Bipolarity and the Future of U.S.-China Relations” Volume 133 Number 3 2018, *Political Science Quarterly* hal 497

Dalam penelitiannya, Maher Richard menjelaskan bahwa bipolaritas AS-Tiongkok di era sekarang cenderung berbeda dibanding dengan masa Perang Dingin AS-USSR. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sistem internasional dimasa sekarang yang relatif stabil dibandingkan masa Perang Dingin. Hubungan *High Politics* antara AS dan USSR menimbulkan banyak konflik yang terjadi disekitarnya mulai dari *Proxy War*, persaingan Senjata nuklir hingga *Arms Race* mengancam pecahnya perang dalam skala global. Secara garis besar, Bipolaritas AS-Tiongkok saat ini hanya berfokus pada persaingan ketat ekonomi pasar bebas dan persaingan industri ekonomi modern meskipun Tiongkok melakukan peningkatan kapabilitas militernya namun menurut Richard Maher Tiongkok masih lemah dibandingkan kemampuan militer Amerika Serikat.

Penelitian Kedua berjudul “Bipolarity, Proxy Wars, and the Rise of China” yang diterbitkan pada tahun 2011, ditulis oleh Mark O. Yeisley yang merupakan LetKol USAF.¹⁴ Beliau juga adalah seorang Asisten Professor Hubungan Internasional di School of Advanced Air and Space Studies. Jurnal ini membahas tentang keadaan Bipolaritas baru dalam sistem internasional yaitu Tiongkok menjadi *Rising Power* Terhadap Amerika Serikat sebagai Negara Hegemoni paska perang dingin usai. Dalam penelitiannya Mark O Yeisley berpendapat bahwa Hegemoni AS dalam sistem internasional tidak akan bertahan lama lagi melihat Tiongkok yang perlahan muncul sebagai pesaing baru dengan kekuatan ekonominya. *Proxy War* Tiongkok di Afrika

¹⁴ Yeisley, O Mark. 2011. “Bipolarity, Proxy Wars, and the Rise of China” *Strategic Studies Quarterly*. Vol.5, No.4

menjadikan negara Afrika Selatan sebagai perantara yang juga merupakan sekutunya di BRICS (*Brazil, Russia, India, China, and South Africa*), dengan fokus pada infrastruktur, Tiongkok telah merajai investasi di Afrika, dan hal ini menjadi ancaman bagi Amerika Serikat yang mulai tersaingi pengaruhnya di Benua Afrika.

Penelitian Ketiga berjudul “The U.S Asia Re*Balancing* and the Taiwan Strait Rapprochment” yang diterbitkan pada 2015, ditulis oleh Vincent Wei-cheng Wang yang merupakan Dekan *School of Humanities and Sciences* dan Profesor di *Ithaca college*, spesialisasi Ekonomi Politik Internasional dan *Asian Studies*.¹⁵ Jurnal ini membahas tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Barack Obama yakni *Asia Pivot* di Kawasan Asia Pasifik.

Kebijakan *Asia Pivot* oleh Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik merupakan bentuk penyeimbangan kekuatan AS melawan Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik. Paska Krisis Global 2008, AS menyadari bahwa Asia memegang kunci masa depan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat. Namun dalam kebijakan luar negeri AS tersebut tidak memasukan Taiwan dalam *Blueprint Asia Pivot*. Bahkan pernyataan resmi Barack Obama tidak menyebutkan mengenai kerja sama bilateral dengan Taiwan. Padahal AS banyak menjalin kerja sama dengan negara-negara di Asia dan ikut terlibat dalam Organisasi Regional seperti ASEAN, KTT Asia Timur (East Asia Summit), APEC dll.

¹⁵ Wang, Vincent Wei-cheng. 2015. “The U.S Asia Re*Balancing* and the Taiwan Strait Rapprochment.” *Foreign Policy Research Institute*. Elsevier Inc. Vol.59, No.3

Dalam penelitian ini Vincent Wei-cheng Wang menjelaskan bahwa sikap diam AS tersebut bertujuan untuk mengurangi ketegangan di Selat Taiwan dengan Tiongkok. Kemudian alasan kedua AS menurut Wang yakni Taiwan dianggap membahayakan kepentingan AS pada saat itu melihat hubungan Tiongkok-Taiwan mulai membaik pada masa kepemimpinan Ma Jing-yeou selaku Presiden Taiwan. Oleh karena itu AS merasa Taiwan tidak dapat dipercaya menjadi bagian dari poros Pasifik AS.

Penelitian keempat berjudul “The Impact of Taiwan Issue on Sino-US Relations” yang diterbitkan pada tahun 2014, ditulis oleh Hao Xie seorang akademisi dari *Shanghai-Hongkong Development Institute, Fudan University*¹⁶. Jurnal ini membahas mengenai dampak isu Taiwan terhadap hubungan AS-Tiongkok. Hao Xie menjelaskan penelitian ini membahas dampak isu tersebut dengan menganalisa 4 aspek. Diantaranya yakni, 1) Sikap AS terhadap pasukan kemerdekaan Taiwan; Amerika Serikat mendukung modernisasi militer Taiwan dengan terus mensupport persenjataan defensive Taiwan dalam menghadapi ancaman Tiongkok. Sikap Pro AS terhadap pasukan kemerdekaan Taiwan bertujuan memperkuat pengaruhnya di Kawasan Pasifik termasuk menjaga aliansinya dengan Jepang. 2) Penyesuaian tujuan strategis global AS; Paska isu terorisme 9/11, Pemerintah AS berfokus pada strategi global anti-terorisme dengan bekerja sama dengan Tiongkok.

¹⁶ Xie,Hao. 2014 “The Impact of Taiwan Issue on Sino-US Relations.” *Open Journal of Political Science* Vol,4. No.4

Namun hal ini mempengaruhi hubungannya dengan Taiwan yang mana terjadi penurunan hubungan kerja sama AS-Taiwan. 3) kebangkitan Tiongkok dan penyesuaian strategi Tiongkok-AS; besarnya pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia membuat AS merasa tersaingi sebagai negara hegemon. Namun kerja sama AS-Tiongkok tetap terjalin, Tiongkok turut membantu AS dalam mencegah proliferasi senjata pemusnah massal dan memerangi terorisme di dunia. Kemudian di sisi lain, isu Taiwan turut mempengaruhi hubungan AS-Tiongkok yang membuatnya menjadi kompleks. 4) Faktor-faktor masalah Taiwan yang memengaruhi pola kepentingan bersama Tiongkok dan AS; Taiwan menjadi agen penting Amerika yang dapat membantu AS untuk mendapatkan kepentingan strategis di kawasan Asia-Pasifik serta menyebarkan pengaruhnya di Kawasan Asia.

Penelitian Kelima Berjudul “Taiwan Public Opinion on Cross-Strait Security Issues : Implications for US Foreign Policy” yang diterbitkan pada tahun 2013 , ditulis oleh Yuan-kang Wang seorang *Associate Professor* di *Department of Sociology at Western Michigan University*¹⁷. Jurnal ini membahas tentang opini publik rakyat Taiwan pada keamanan lintas Selat Taiwan. Sebagian besar rakyat Taiwan percaya kepada AS untuk melindungi Pulau Taiwan tersebut dari ancaman Militer Tiongkok. Yuan-kang Wang memberikan penjelasan mengenai opini rakyat Taiwan yang lebih mendukung Amerika Serikat dibandingkan bersatu dengan daratan utama Tiongkok. Hal ini dibuktikan dengan beberapa survei dan voting yang dipaparkan oleh Wang pada

¹⁷ Wang, Yuan-kang.2013.”Taiwan Public Opinion on Cross-Strait Security Issues : Implications for US Foreign Policy “. *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 7, No. 2

tahun 2011. Wang berpendapat meskipun hingga saat ini belum ada indikasi serangan militer Tiongkok ke Taiwan namun sebagian besar rakyat Taiwan yakin dan optimis jika AS akan melindungi Taiwan. Hal ini merupakan implikasi dari kebijakan luar negeri AS di Kawasan Selat Taiwan yang mencoba menyebarkan pengaruhnya di Asia-Pasifik untuk menyaingi Tiongkok. Kebijakan AS dalam melakukan perdagangan senjata ke Taiwan secara tidak langsung mendapatkan dukungan dari rakyat Taiwan dan berpihak kepada AS.

Penelitian Keenam Berjudul “Soft Power in A Hard Place: China, Taiwan, Cross-Strait Relations and U.S. Policy” yang diterbitkan pada tahun 2010, ditulis oleh Jacques deLisle yang merupakan direktur Program Asia di FPRI.¹⁸ Jurnal ini membahas mengenai analisis Soft Power Tiongkok mengingat kebangkitan Tiongkok yang terus-menerus menyebarkan pengaruhnya dalam skala global. Kemudian penelitian ini menjelaskan bagaimana penggunaan soft power Tiongkok dan apakah Tiongkok mampu menjadi rival AS dalam penggunaan soft power. Beberapa contoh penerapan Soft power yang dilakukan Tiongkok diantaranya memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia, atau reformasi politik internal di Korea Utara, Myanmar, Iran, Irak, Sudan, Zimbabwe, bekas Yugoslavia dll. Selain itu dukungan finansial dari Tiongkok juga dilakukan seperti investasi dan peminjaman modal. Namun menurut Jacques, Soft Power Tiongkok masih relatif lemah dibandingkan Amerika Serikat. Bentuk-bentuk soft power Tiongkok seperti dukungan diplomatik, bantuan pembangunan sederhana

¹⁸ deLisle, Jacques. 2010. “Soft Power in A Hard Place: China, Taiwan, Cross-Strait Relations and U.S. Policy” *Foreign Policy Research Institute*. Elsevier Inc. Vol.54, No.4

dan investasi asing dinilai *relative* lemah dalam mendapatkan pengaruh khususnya di Kawasan Eropa.

Penelitian Ketujuh Berjudul “Prospect for U.S.-Taiwan Relations” yang diterbitkan pada tahun 2016, ditulis oleh Vincent Wei-cheng Wang yang merupakan Dekan *School of Humanities and Sciences* dan Profesor di *Ithaca college*, spesialisasi Ekonomi Politik Internasional dan *Asian Studies*.¹⁹ Jurnal ini membahas tentang peluang dan tantangan dalam hubungan AS-Taiwan paska terpilihnya Presiden Taiwan yang baru Tsai-Ing wen dari partai DPP (*Democratic Progresive Party*) Januari 2016.

Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa terpilihnya Tsai sebagai Presiden Taiwan yang baru akan mempererat hubungan dengan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Tsai mendukung penuh hubungan lintas selat tersebut dan menjaga *Status quo* Taiwan. Para pejabat AS berpendapat bahwa terpilihnya Tsai tidak akan membuat Taiwan tunduk terhadap Tiongkok dan menolak konsensus 1992 atau *One China Policy*. Dalam penelitian ini juga penulis memberikan gambaran tentang perbandingan antara 3 Presiden Taiwan dalam menjaga hubungan Lintas-Selat dengan Amerika Serikat serta melihat dinamika hubungan Taiwan-Tiongkok.

Pada masa kepemimpinan Chen Shui-bian (2000-2008) hubungan Taiwan-Tiongkok cenderung tidak stabil. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh Chen lebih menekankan pada pengakuan Taiwan secara *de jure* dan juga mempromosikan Identitas Taiwan paska 2 tahun ia terpilih. Presiden setelah Chen, Ma Ying-jeou

¹⁹ Wang, Vincent Wei-cheng. 2016. “Prospect for U.S.-Taiwan Relations”. *Foreign Policy Research Institute*. Elsevier Inc. Vol.60, No.4

(Periode 2008-2016) memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda. Ma lebih memprioritaskan untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat paska turunnya Chen dan juga menjaga hubungan bilateral dengan Jepang serta menjalin perdamaian dengan Tiongkok. Kemudian yang terakhir yakni Presiden Tsai, Presiden perempuan Taiwan pertama yang terpilih pada tahun 2016. Presiden Tsai Ing-wen memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat sehingga terpilihnya Tsai menjadi Presiden Taiwan tentunya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap intensitas hubungan AS-Taiwan. AS yakin dengan presiden Tsai bahwa tidak akan ada reunifikasi antara Tiongkok-Taiwan, setidaknya secara suka rela.

Berdasarkan ketujuh jurnal di atas peneliti kelompokan menjadi beberapa bagian. Terdapat 2 literatur sebelumnya yang membahas mengenai Bipolaritas dan *Rising Power* Tiongkok terhadap Amerika Serikat yaitu “Bipolarity and the Future of U.S.-China Relations”. Diterbitkan pada tahun 2018, ditulis oleh Richard Maher dan “Bipolarity, Proxy Wars, and the Rise of China” yang diterbitkan pada tahun 2011, ditulis oleh Mark O. Yeisley. Kemudian tiga literatur yang membahas Hubungan lintas selat AS-Taiwan yaitu “The U.S Asia Re*Balancing* and the Taiwan Strait Rapprochment” yang diterbitkan pada 2015, ditulis oleh Vincent Wei-cheng Wang dan “Taiwan Public Opinion on Cross-Strait Security Issues : Implications for US Foreign Policy” yang diterbitkan pada tahun 2013 , ditulis oleh Yuan-kang Wang serta “Prospect for U.S.-Taiwan Relations” yang diterbitkan pada tahun 2016, ditulis oleh Vincent Wei-cheng Wang. Kemudian terdapat satu literatur yang membahas mengenai penggunaan soft power Tiongkok dan Taiwan serta kaitannya dengan kebijakan luar

negeri AS di kawasan selat Taiwan yakni “Soft Power in A Hard Place: China, Taiwan, Cross-Strait Relations and U.S. Policy” yang diterbitkan pada tahun 2010, Ditulis oleh Jacques deLisle. Terakhir satu literatur yang membahas mengenai dampak isu Taiwan terhadap hubungan AS-Tiongkok yakni “The Impact of Taiwan Issue on Sino-US Relations” yang diterbitkan pada tahun 2014, ditulis oleh Hao Xie.

Keunikan dari penelitian ini adalah peneliti akan membahas mengenai bentuk respon Tiongkok terhadap kerja sama perdagangan senjata yang dilakukan oleh AS-Taiwan khususnya pada masa Pemerintahan Presiden Barack Obama. Kerja sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Taiwan tentunya membuat Tiongkok tidak senang. Hal ini dikarenakan sikap AS yang tidak menghargai prinsip *One China Policy* milik Tiongkok dengan menggunakan Teori Respon, Teori Politik Internasional dan Konsep *Balance of Threat*. Semoga dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk membahas penelitian ini. Berikut di bawah ini tabel komparasi penelitian terdahulu dengan tema yang sama dengan peneliti.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Fokus Tulisan
1.	Richard Maher	Bipolarity and the Future of U.S.-China Relations	Secara garis besar, Bipolaritas AS-Tiongkok saat ini hanya berfokus pada persaingan ketat ekonomi pasar bebas dan persaingan industri ekonomi modern meskipun Tiongkok melakukan peningkatan kapabilitas militernya namun Tiongkok masih lemah dibandingkan kemampuan militer Amerika.
2.	Mark O. Yeisley	Bipolarity, Proxy Wars, and the Rise of China	Hegemoni AS dalam sistem internasional tidak akan bertahan lama lagi melihat Tiongkok yang perlahan muncul sebagai pesaing baru dengan kekuatan ekonominya.
3.	Vincent Wei-cheng Wang	The U.S Asia ReBalancing and the Taiwan Strait Rapprochment	Membahas tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Barack Obama yakni <i>Asia Pivot</i> di Kawasan Asia Pasifik. AS menyadari bahwa Asia memegang kunci masa depan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat.
4.	Hao Xie	The Impact of Taiwan Issue on Sino-US Relations	Dampak Isu Taiwan terhadap hubungan AS-Tiongkok dengan menganalisa 4 aspek 1). Sikap AS terhadap pasukan kemerdekaan Taiwan 2). Penyesuaian tujuan strategis global AS; 3). Kebangkitan Tiongkok dan penyesuaian strategi Tiongkok-AS; 4). Faktor-faktor masalah Taiwan yang memengaruhi pola kepentingan bersama Cina dan AS;
5.	Yuan-kang Wang	Taiwan Public Opinion on Cross-Strait Security Issues : Implications for US Foreign Policy	Jurnal ini membahas tentang opini publik rakyat Taiwan pada keamanan lintas selat Taiwan. Sebagian besar rakyat Taiwan percaya kepada AS untuk melindungi Pulau Taiwan tersebut dari Ancaman Militer Tiongkok Meskipun hingga saat ini belum ada indikasi serangan militer Tiongkok ke Taiwan namun sebagian besar rakyat Taiwan yakin dan optimis jika AS akan melindungi Taiwan.
6.	Jacques deLisle	Soft Power in A Hard Place: China, Taiwan, Cross-Strait Relations and U.S. Policy	Soft Power Tiongkok masih relatif lemah dibandingkan Amerika Serikat. Bentuk-bentuk soft power Tiongkok seperti dukungan diplomatik, bantuan pembangunan sederhana dan investasi asing dinilai relative lemah dalam mendapatkan pengaruh besar dalam sistem internasional seperti Amerika Serikat.
7.	Vincent Wei-cheng Wang	Prospect for U.S.-Taiwan Relations	terpilihnya Tsai sebagai Presiden Taiwan yang baru akan mempererat hubungan dengan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Tsai mendukung penuh hubungan lintas selat tersebut dan menjaga <i>Status quo</i> Taiwan. Para pejabat AS berpendapat bahwa terpilihnya Tsai tidak akan membuat Taiwan tunduk terhadap Tiongkok dan menolak konsensus 1992 atau <i>One China Policy</i> .

Sumber : Diolah oleh peneliti

2.2 Landasan Teori

Dalam menjelaskan Respon Tiongkok terhadap hubungan AS-Taiwan diperlukan suatu landasan teori yang akan membantu peneliti dalam menentukan logika berfikir dalam penelitian ini. Sehingga peneliti akan menggunakan 2 teori dan 2 konsep yang dalam menjelaskan penelitian ini yakni teori Respon, teori Politik Internasional dan konsep *Balance of Threat*.

2.2.1 Respon

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Respon di artikan sebagai tanggapan, dan jawaban.²⁰ Menurut Ahmad Subandi, respon dengan istilah umpan balik yang memiliki peran atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi.²¹ Secara umum respon dapat di artikan sebagai bentuk rangsangan yang di dapat terhadap suatu hal. Hal ini bisa saja berupa subjek, peristiwa-peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sederhananya respon dapat terbagi menjadi 2 macam, respon terhadap objek/benda dan respon terhadap perkataan dalam komunikasi. Bentuk respon terbagi atas 3 respon menerima, menolak hingga acuh. Istilah respon juga sering dipakai dalam konteks hubungan internasional.

²⁰ Hasan Alwi dkk, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, edisi ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka,), halaman 952

²¹ Subandi, Ahmad. 1982, Psikologi Sosial, cet. ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang,), hal 50

Dalam konteks hubungan internasional, respon dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan negara seperti uji coba persenjataan, latihan militer bersama hingga perdagangan senjata dengan negara lainnya, dsb. Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik dimasyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya.

2.2.2 Politik Internasional

Politik internasional seperti halnya politik domestik terdiri dari elemen-elemen kerja sama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat perbedaan antara lawan dan kawan. Politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas tindakan suatu negara lain. Dengan kata lain politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih. Dalam interaksi antarnegara terdapat hubungan pengaruh dan respons.²² Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Kemudian, dalam interaksi antarnegara interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara

²² K.J Holsti, 2005, Politik Internasional: kerangka untuk analisis terjemahan Wawan Juanda hal 40

Berdasarkan bukunya “Theory of International Politics” Kenneth Waltz menjelaskan bahwa Sistem Internasional terdiri dari sejumlah kekuatan besar, yang masing-masing berusaha untuk bertahan karena sistem berjalan secara anarkis (suatu kondisi yang dihasilkan karena tidak adanya otoritas sentral yang dapat mengaturnya).²³ Dalam bukunya waltz menjelaskan bahwa terdapat 3 karakteristik dalam membahas politik internasional. Pertama, *Ordering Principle of System* (prinsip pengorganisasian sistem), menurut Waltz politik internasional memiliki prinsip anarkis lalu karakter kedua, *the character of units* (karakter unit) dimana negara sederhananya memiliki kesamaan tugas dan fungsi yakni menjamin kelangsungan hidupnya/ *Survive* namun terdapat perbedaan kapabilitas bagaimana negara tersebut melakukannya dan ketiga, *the distribution of capabilities* (distribusi kapabilitas) dalam hal ini berkaitan dengan power suatu negara yang mempengaruhi negara lain sehingga Waltz menganggap bahwa negara-negara, khususnya Negara Negara adidaya, memiliki kesensitifan pada kapabilitas dari negara-negara lain. Waltz berpendapat bahwa negara-negara berkekuatan besar adalah mereka yang mengatur sistem internasional.²⁴

Waltz melihat bentuk sistem politik dunia pada perang dingin di kuasai oleh 2 kekuatan besar AS dan USSR. Waltz mendefinisikan fenomena ini sebagai kondisi bipolar. di mana hanya ada dua kekuatan besar yang ada di

²³ Waltz, N Kenneth. 1979, *Theory of International Politics*, (Reading: Addison – Wesley), hal 80.

²⁴ Ibid, hal 195.

dunia. Menurutnya, sistem bipolar ini lebih efektif dibandingkan sistem multipolar. Sistem bipolar disebutkan lebih stabil dan menghadirkan jaminan keamanan dan juga perdamaian di dunia dibandingkan dengan sistem multipolar. Sistem bipolar disebut lebih stabil karena dalam sistem tersebut hanya terdapat dua negara yang menjadi pemuncak pimpinan penguasa power di dunia, sehingga mengurangi kemungkinan benturan antara power yang lebih banyak yang bisa berakibat pada perang.²⁵

Kini, Sistem tersebut kembali muncul akibat peningkatan kapabilitas power Tiongkok menjadikan Tiongkok sebagai pesaing baru AS dalam sistem internasional. Munculnya Tiongkok sebagai *Rising Power* terhadap AS sebagai negara hegemoni dianggap sebagai bentuk bipolaritas baru paska pecahnya USSR. Bipolaritas menurut KKBI merupakan sistem perimbangan kekuatan yang menempatkan negara-negara ke dalam dua kutub kekuatan yang saling bersaing dan dipimpin oleh satu kekuatan penentu. Namun bipolaritas tidak hanya sebatas dua kutub kekuatan dalam sistem internasional. Bipolaritas dapat ditandai dengan pola kerja sama serta persaingan antara dua negara dominan tersebut.²⁶

Penggunaan Teori Politik Internasional dari Kenneth Waltz menurut peneliti cocok digunakan dalam penelitian ini dan dapat membantu dalam menjelaskan fenomena yang sedang diteliti terutama dalam menjelaskan

²⁵ Ibid, hal 111

²⁶ Maher, Richard. 2018. "Bipolarity and the Future of U.S.-China Relations". *Political Science Quarterly*. Vol. 133 No. 3 hal 3

fenomena bipolaritas baru dalam sistem internasional yang mana Tiongkok muncul sebagai *rising power* dan pesaing baru Amerika Serikat.

2.2.3 Balance of Threat

Sekilas *Balance of Power* dan *Balance of Threat* terlihat sama namun terdapat perbedaan antar keduanya yang mana perilaku atau sikap negara dalam melakukan tindakan adalah bentuk respon atas adanya ancaman dari luar atau sistem internasional. Seperti yang dijelaskan Stephen M. Walt dalam bukunya *Balance of Threat: The Origins of Alliance*. Menurut Walt, Sistem internasional yang anarki dan tidak adanya distribusi kekuatan yang berimbang negara akan cenderung melakukan aliansi dengan atau melawan kekuatan yang paling mengancam.

Dalam konsep ini walt juga menjelaskan negara merespon atas datangnya ancaman yang datang. Sumber-sumber ancaman itu sendiri dapat dibagi dalam beberapa bagian;

- Agregat kekuatan: Hal ini dapat dilihat dari total sumber daya suatu Negara (populasi, industri, kemampuan militer, kekuatan teknologi, dll)
- *Proximate Power* (Kekuatan terdekat): Negara-negara juga akan beraliansi untuk merespon ancaman-ancaman dari Negara terdekat. Karena ancaman dari kekuatan terdekat jauh lebih berbahaya daripada Negara yang secara geografikal letaknya lebih jauh..

- *Offensive Power* (Kekuatan Ofensif) : diartikan sebagai kemampuan untuk mengancam kedaulatan atau teritori integritas suatu negara. Ancaman seperti ini akan membuat suatu Negara beraliansi untuk menyeimbangkannya.
- *Offensive Intention* (Intensi Agresif) : Negara yang memunculkan keagresifitasan akan memprovokasi suatu Negara untuk melakukan aliansi dan menyerang negara lain.²⁷

Dalam *Balance of Threat* dijelaskan bahwa terdapat dua bentuk respon yang dilakukan negara dalam menghadapi datangnya ancaman, yaitu *Balancing* dan *Bandwagoning*. *Balancing* menurut Walt merupakan sikap yang dilakukan negara untuk mengimbangi atau membentuk Aliansi. *Bandwagoning* merupakan sikap negara dengan ikut bergabung dengan salah satu negara dengan *Power* yang besar. Tujuan dari suatu Negara masuk dalam suatu aliansi adalah untuk mencegah dominasi dari kekuatan yang lebih besar dimana Negara akan bergabung untuk melindungi diri mereka sendiri dari negara-negara atau aliansi yang mempunyai sumber-sumber daya yang besar yang dapat menjadi ancaman bagi negaranya.

Menurut Walt, dalam sistem internasional negara umumnya melakukan *Balancing* dengan bergabung dalam aliansi negara lain yang memiliki sumber ancaman yang sama dan lebih sering digunakan dibandingkan *Bandwagoning*. Hal ini dikarenakan *Balancing* dilakukan pada saat keadaan belum terciptanya

²⁷ Walt, M. Stephen, 1987, *Origin of Alliance*. Copyright by Cornell University hal 22-24

konflik dan damai sedangkan *Bandwagoning* sebaliknya, strategi ini dilakukan ketika negara merasa tidak dapat mengatasi datangnya ancaman tersebut dan memilih untuk berteman atau bergabung dengan negara yang merasa mengancam. strategi ini cenderung dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kapabilitas militer yang lemah.²⁸

Kemudian Walt dalam jurnalnya “*Alliances Formation and the Balance of World Power*” menjelaskan secara tersirat yang peneliti rangkum menjadi 5 indikator untuk menentukan kapan negara akan melakukan *Balancing* dan kapan negara akan melakukan *Bandwagoning*, diantaranya;

- *Power and Weakness*: negara kuat, yang lebih cenderung untuk melakukan *Balancing* daripada *Bandwagoning* begitupun sebaliknya. Namun, negara-negara yang lemah dapat diharapkan untuk melakukan *Balancing* ketika mereka terancam oleh negara-negara dengan kekuatan yang kurang lebih sama, tapi mereka akan cenderung melakukan *Bandwagoning* ketika terancam oleh kekuatan yang besar.
- *The Availability of Allies*: ketika suatu negara terancam oleh kekuatan yang besar negara akan lebih memilih untuk melakukan *Bandwagoning* jika mereka gagal dalam menemukan sekutu potensial yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka.

²⁸ Ibid, hal 17

- *Peace and War*: sejarah telah memperlihatkan bahwa negara akan cenderung melakukan *Balancing* di masa damai atau pada masa awal perang, karena mereka berusaha untuk mencegah timbulnya kekuatan yang bersifat mengancam. Tapi ketika pada masa akhir perang, negara-negara tertentu akan lebih cenderung melakukan *Bandwagoning* dengan pihak pemenang.
- *The Structure of World Order*: distribusi kekuatan antar aktor internasional yang berbeda dapat mempengaruhi keputusan suatu negara dalam memutuskan untuk melakukan *Balancing* atau *Bandwagoning*. Dalam sistem bipolar atau multi polar, negara lebih cenderung untuk melakukan *Balancing* karena mereka mencoba untuk memanfaatkan persaingan diantara negara-negara adidaya.
- *The Vulnerability of State*: negara akan lebih cenderung melakukan *Bandwagoning*, ketika negara mereka memiliki permasalahan dengan demokratisasi, dan ketergantungan ekonomi. *Balancing* merupakan sebuah sikap menantang dan agresif yang memerlukan dukungan sosial rasional untuk dipertahankan. Sebuah sistem demokrasi berfungsi sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Demikian pula dengan *Balancing* membutuhkan semacam saling ketergantungan antara yang mengancam dan negara yang terancam.²⁹

²⁹ Waltz.M Stephen , 1985, "Alliances Formation and the Balance of World Power". *International Security*, Vol. 9, No.4 Sprinveg, hal 18-21

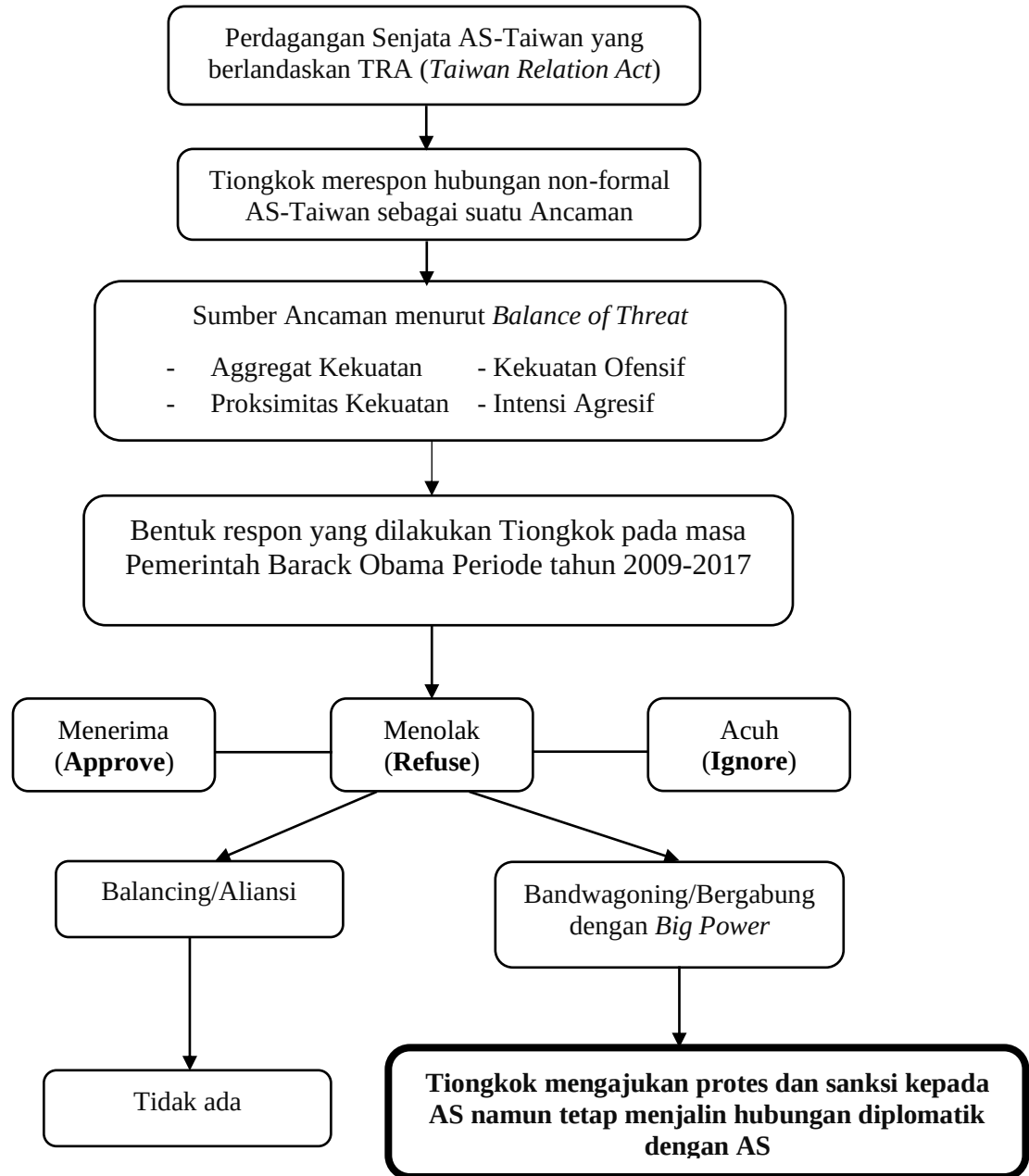
Berdasarkan penjelasan di atas maka konsep *Balance of Threat* menurut penulis lebih dapat menjelaskan dan membantu penelitian itu dalam melihat respon Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Alasan selanjutnya adalah penggunaan konsep *Balance of Threat* tidak hanya untuk negara Adidaya dan tidak berfokus pada power negara saja.

2.3 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana Tiongkok merespon hubungan non-formal AS-Taiwan dalam perdagangan senjata konvensional. Kerja sama militer AS-Taiwan bertujuan untuk melindungi eksistensi wilayahnya dengan cara meningkatkan kekuatan militernya di bidang pertahanan. Hal ini tentunya menarik perhatian Tiongkok, bahwa Taiwan menolak bergabung dengan Tiongkok.

Dalam konteks hubungan militer AS-Taiwan, Tiongkok merasa di ancam atas aliansi tersebut. Bagi Tiongkok, Dampak kerja sama militer AS-Taiwan merupakan usaha membendung Tiongkok jadi kekuatan baru dunia. kemudian proses unifikasi yang ingin dilakukan oleh Tiongkok akan semakin sukar menemui titik akhir. Dengan masuknya pengaruh AS di selat Taiwan tentunya akan mempengaruhi stabilitas keamanan di selat tersebut dimana kedua kubu tersebut saling bersitegang. Tiongkok telah melakukan sejumlah latihan militer di daerah tersebut dengan tujuan memberikan tekanan pada Taiwan. Sedangkan Taiwan sendiri telah meningkatkan anggaran pertahanannya dan meningkatkan kemampuan militernya dengan bantuan AS di belakangnya.

Berdasarkan pemaparan kerangka berpikir di atas maka penulis mengambil satu kesimpulan yang diwujudkan dalam bentuk bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.3. : Kerangka Pikir

Sumber : Diolah oleh Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan isu atau studi kasus yang menggunakan tipe penelitian Kualitatif sebagai cara untuk meneliti atau menganalisis fenomena yang terjadi. Kemudian alur logika penelitian ini bersifat induktif yang mana menggambarkan masalah secara umum terlebih dahulu lalu menggambarkan masalah secara khusus. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³⁰

Teknik analisis data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Kemudian peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang.³¹ Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria pembedaan antara lain fungsi akhir dan

³⁰ Creswell, J., W., 2012, Research design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed; Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 4

³¹ Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta hal 2

pendekatannya. Berdasarkan definisi dari 2 ahli di atas maka peneliti akan melakukan analisis mengenai respon Tiongkok terhadap perdagangan senjata AS-Taiwan pada masa Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Barack Obama (2009-2017).

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada bentuk respon Tiongkok terhadap perdagangan senjata AS-Taiwan pada masa Pemerintah Presiden Amerika Serikat Barack Obama (2009-2017). Oleh karena itu penulis akan menjelaskan bentuk respon Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam penjualan senjata militer dengan melihat sikap Tiongkok apakah menerima, menolak atau acuh terhadap Perdagangan Senjata AS-Taiwan pada masa Presiden AS Barack Obama Periode 2009-2017 dengan menganalisis sikap hingga pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap AS.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah ada dan berasal dari pihak kedua. Data sekunder tersebut berasal dari studi pustaka bersumber dari bahan bacaan koran, buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti SIPRI (*The Stockholm International Peace Research Institute*) yang dapat diakses melalui <https://sipri.org> , ATT (*Arms Trade Treaty*) diakses melalui <http://static.un.org> , *The Military Balance* IISS (*International Institute of Strategic Studies*) , *World Bank* dan juga dengan penelusuran internet yang berkaitan tentang penjualan senjata militer Amerika Serikat

ke Taiwan, peningkatan kapabilitas kekuatan militer Taiwan hingga Respon Tiongkok terhadap penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan laporan penelitian ini, maka peneliti memilih teknik penulisan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik yang bersifat teori maupun bersifat empiris, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti diantaranya berasal dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain. Menurut Sugiyono, “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.³²

3.5 Teknik Keabsahan Data

Menurut Neuman, triangulasi merupakan teknik pengukuran dan pengamatan terhadap objek dari berbagai perspektif. Pengukuran ini digunakan agar diperoleh hasil yang benar dan tepat.³³ Penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi teknik, yaitu terdapat beberapa sumber data yang digunakan untuk meneliti masalah penelitian. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

³² Ibid, Hal 62.

³³ Neuman, W. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson, Essex, UK. Hal 166

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk selanjutnya dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan yang berbeda, mana yang spesifik dari beberapa sumber data tersebut. Triangulasi teknik menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.³⁴

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang serupa Teks maupun gambar. Pada dasarnya proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber. Teknis Analisis data yang digunakan mengikuti alur teknik analisis data Miles dan Huberman, yakni; reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁵ Reduksi data merupakan tahap menyeleksi data yang memfokuskan penelitian dan membuang data yang tidak di perlukan, *Display* data adalah tahap pemaparan hasil olahan data yang dianalisis guna mendukung asumsi penulis diakhir penelitian. Kemudian yang terakhir penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir atas penelitian yang dilakukan.

³⁴ Ibid, hal 167.

³⁵ Miles, B. Matthew Dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP. Hal 10-12

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Perdagangan Senjata yang dilakukan Amerika Serikat kepada Taiwan merupakan isu yang sensitif bagi Tiongkok mengingat kemerdekaan Taiwan masih belum diakui oleh Tiongkok. Kerja sama yang dijalin AS-Taiwan tentunya berdampak pada dinamika hubungan AS-Tiongkok sehingga terjadi pergesekan konflik antara AS dengan Tiongkok. Bab ini akan memaparkan gambaran umum penelitian yang penulis klasifikasikan kedalam 3 sub-bab yang terdiri dari **Hubungan Bilateral AS-Tiongkok** yang bertujuan untuk menjelaskan sejarah hubungan keduanya hingga dinamika hubungan AS-Tiongkok sebelum masa Kepresidenan Barack Obama. Selanjutnya membahas mengenai **Hubungan AS-Taiwan** yang bertujuan untuk menunjukan sejarah awal mula hubungan AS-Taiwan dan apa yang menjadi landasan hukum bagi Amerika Serikat dalam menjalin kerja sama dengan Taiwan. kemudian pada sub-bab terakhir membahas mengenai **Kerja sama Perdagangan Senjata AS-Taiwan** yang bertujuan untuk membahas kepentingan dan Motif AS untuk tetap melakukan kerja sama perdagangan senjata dengan Taiwan meskipun telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok sendiri serta menunjukan data perdagangan senjata yang telah disepakati oleh AS kepada Taiwan.

Namun sebelumnya peneliti akan menjelaskan hubungan Tiongkok dengan Taiwan terlebih dahulu mengingat sensitifitas Tiongkok terhadap isu yang menyangkut tentang Taiwan. Hingga saat ini Tiongkok masih menganggap Taiwan sebagai provinsi yang merupakan bagian dari wilayahnya, sehingga tidak memenuhi syarat dalam hubungan negara ke negara. Hubungan keduanya menjadi kompleks karena status politik Taiwan yang masih dikekang oleh Tiongkok. Selain itu, Tiongkok berusaha menghalangi hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain termasuk Amerika Serikat dengan menggunakan kebijakan *One China Policy*. Kebijakan *One China Policy* yang dibuat Tiongkok bertujuan untuk menghalangi negara lain untuk melakukan hubungan kerja sama langsung dengan Taiwan dan dialihkan ke Tiongkok sebagai pusat Pemerintahan. Pembahasan lebih lanjut mengenai *One China Policy* akan tersedia pada sub-bab pertama.

Hubungan Tiongkok-Taiwan atau sering kali di istilahkan dengan *Cross-Strait Relations* merupakan hubungan antara dua daratan Cina yang terpisahkan oleh Selat Taiwan. Berdasarkan sejarahnya Pemerintahan Taiwan terbentuk akibat perang saudara yang terjadi paska Perang dunia II berakhir. Perang saudara tersebut terjadi di daratan utama Tiongkok antara kelompok CPC (*Communist Party of China*) yang menginginkan Pemerintahan Komunis di daratan Tiongkok dan kelompok KMT (Kuomintang) yang beraliran Nasionalis yang menyebabkan perpecahan politik di daratan Tiongkok.³⁶ Pada tahun 1949 CPC berhasil menguasai daratan utama Tiongkok dan memaksa kelompok KMT terasingkan ke wilayah Taiwan. CPC berhasil

³⁶ Taiwan History di akses melalui https://www.taiwan.gov.tw/content_3.php pada 7 juli 2019

mendirikan Pemerintahan komunis di Tiongkok di bawah kepemimpinan Mao Zedong sedangkan kelompok KMT menetap di wilayah Taiwan beserta rakyat Tiongkok yang pro terhadap KMT sebanyak 1.2 juta jiwa dan mendirikan Pemerintahan sendiri di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek.³⁷

Perang saudara pun berakhir tanpa adanya perjanjian damai antara Tiongkok dan Taiwan. Hubungan kedua Pemerintahan tersebut masih saling bersitegang dan tidak stabil. Meskipun KMT telah mengasingkan diri ke Taiwan, Tiongkok tetap berusaha mendapatkan kembali wilayah tersebut dan melancarkan serangan militer ke wilayah Taiwan. Serangan militer yang terus dilakukan Tiongkok menyebabkan krisis di Selat Taiwan akibat serangan militer yang dilancarkan Tiongkok melalui jalur laut serta pengeboman di beberapa pulau terluar wilayah Taiwan. Kemampuan militer Taiwan yang tidak sebanding dengan Tiongkok membuat Taiwan menjadi terdesak. Konflik di selat Taiwan tersebut kemudian mendapatkan perhatian oleh AS. Pada tahun 1954, Pemerintah AS turun tangan dalam konflik Tiongkok-Taiwan. AS kemudian berpihak pada Taiwan dan mengajukan kerja sama pertahanan bersama dengan Chiang Kai-shek yang di sebut *U.S.-ROC Mutual Defense Treaty*.³⁸

Dukungan militer yang diberikan oleh AS kepada Taiwan mendapat kecaman dari Tiongkok yang menganggap hal tersebut merupakan konflik internalnya. Di satu sisi, pihak AS juga sedang bersitegang dengan Tiongkok yang dianggap bersekutu

³⁷ China-Taiwan Relation di akses melalui <https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations> pada 9 juli 2019

³⁸ The Taiwan Strait Crisis di akses melalui <https://history.state.gov/milestones/1953-1960/taiwan-strait-crises> pada 9 juli 1019

dengan USSR karena ikut beraliran komunisme yang bertentangan dengan ideologi AS yang Liberal. Melalui U.S.-ROC *Mutual Defense Treaty* tersebut AS mengirimkan armada perang dan personil militernya yang ditempatkan di pulau-pulau terluar wilayah Taiwan. Selain itu, AS menjadi pihak negosiator antara Tiongkok dan Taiwan untuk mempertimbangkan jalur penyelesaian konflik dengan damai atau mengancam menggunakan senjata nuklir kepada Tiongkok secara paksa. Tiongkok pun bersedia dan menarik pasukannya dari wilayah Taiwan dan Krisis di Selat Taiwan sempat terhenti di tahun 1955 namun kembali berlanjut selang 3 tahun setelahnya yakni pada tahun 1958, Tiongkok kembali menyerang dan melakukan pengeboman di wilayah Jinmen dan Mazu.³⁹

Konflik bersenjata tersebut terus berlangsung dan akhirnya mereda setelah normalisasi hubungan AS-Tiongkok dan resmi menjalin hubungan diplomatik di tahun 1979. Hal ini kemudian memutuskan kerja sama pertahanan AS-Taiwan dan AS di haruskan menaati *One China Policy* yang telah di ratifikasi AS dalam *Shanghai Communique*. Selama periode normalisasi hubungan AS-Tiongkok, ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan perlahan menurun. Hal ini dikarenakan perhatian Tiongkok beralih ke AS yang mulai membuka kembali jalur kerja sama yang telah di bekukan sejak Pemerintahan komunis di Tiongkok resmi berdiri.

Ambisi Tiongkok untuk merebut kembali Taiwan masih terus berlanjut dan mencoba melakukan proses reunifikasi terhadap Taiwan. Oleh karena itu, Tiongkok sangat sensitif mengenai isu Taiwan dan terus menekankan bahwa Taiwan merupakan

³⁹ Ibid.

bagian yang tak terpisahkan dari Tiongkok dan hanya ada 1 representasi dari Tiongkok (*One China*). Oleh karena itu Tiongkok mengajukan protes keras terhadap AS yang tidak menghargai kedaulatan Tiongkok dan mengganggu upaya reunifikasi yang direncanakan Tiongkok terhadap Taiwan. Selain itu, Tiongkok kerap mengingatkan komitmen yang telah disepakati bersama sejak normalisasi hubungan diplomatik AS-Tiongkok dan menghentikan perdagangan senjata yang dilakukan AS ke Taiwan. Isu perdagangan senjata AS-Taiwan juga kerap menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan AS-Tiongkok yang menyebabkan pergesekan konflik antar keduanya.

4.1 Hubungan Bilateral Amerika Serikat-Tiongkok

Hubungan AS-Tiongkok sering kali dikenal dengan *Sino-U.S. Relationship*. Hubungan keduanya secara umum kerap mengalami kondisi naik turun hingga sekarang. Jika melihat dari sejarah, hubungan AS-Tiongkok telah ada sejak abad 18 yakni pada tahun 1784.⁴⁰ Peristiwa ini bermula ketika kapal dagang AS tiba ke daratan Tiongkok dari pelabuhan New York. Saat itu, AS menawarkan produk kain, merica dan ginseng kepada Tiongkok.⁴¹ Amerika Serikat tertarik dengan perekonomian Tiongkok pada saat itu dan mencoba mencari pasar baru setelah Kerajaan British menolak melakukan kesepakatan dagang dengan Amerika. Di satu sisi Tiongkok tertarik untuk bekerja sama dengan AS, yang juga membeli produk milik Tiongkok

⁴⁰ U.S.-China Relations: A Brief Historical Perspective di akses melalui uscipf.org/v3/wp-content/uploads/2014/08/backgrounder-on-US-China-relations.pdf pada 9 April 2019

⁴¹ U.S.-China Trade Timeline Since 1784-2008 di akses melalui <https://worldview.stratfor.com/article/us-china-trade-timeline-1784-2008> pada 10 april 2019

yang diantaranya yakni rempah-rempah, sutra dan keramik porselen.⁴² Hubungan dagang keduanya masih terus berlanjut dan resmi menjadi mitra dagang pada 1844 di bawah perjanjian Wanghia (*Treaty of Wanghia*).⁴³

Meskipun belum ada data yang menjelaskan apakah Tiongkok menjadi *Major Partner* AS dalam berdagang. Namun sejak abad 18, Tiongkok merupakan mitra dagang AS yang paling sering melakukan transaksi ekspor-impor di kawasan Asia Timur. Hubungan dagang keduanya terus berlanjut hingga paska perang dunia ke II, Amerika Serikat membekukan perjanjian dagang tersebut dan berbalik melawan Tiongkok setelah Partai Komunis Tiongkok/ *Communist Party of China* (CPC) yang dipimpin oleh Mao Zedong mengambil alih daratan Tiongkok dan mendirikan Pemerintahan komunis Tiongkok yang dinamakan *People's Republic of China* (PRC) atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1949.⁴⁴ Sejak saat itu AS mulai memusuhi Tiongkok yang menganut ideologi yang sama dengan USSR yakni komunisme.

4.1.1 Kebangkitan Partai Komunis di Tiongkok

Berdirinya Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong di Tiongkok membuat Hubungan AS-Tiongkok menjadi saling bersitegang. Sejak

⁴² Trade, Faith, and Freedom: The Foundations of U.S. Relations with China. Di akses melalui <https://www.heritage.org/asia/report/the-complicated-history-us-relations-china> pada april 9 April 2019

⁴³ Perjanjian Wanghia atau Treaty of Wanghia merupakan Treaty perdagangan yang pertama kali dilakukan oleh AS dan Dinasti Qing China. Treaty of Wanghia pertama kali di usulkan oleh Pemerintah AS yang di wakili oleh Caleb Cushing. Perjanjian ini berisi kesepakatan dagang, Hak dan kewajiban serta ketentuan Tarif Dagang antar keduanya. Di Akses melalui <https://www.historycentral.com/Ant/wanghia.html> pada 10 April 2019

⁴⁴ Kan,A,Shirley . 2014. Report “China/Taiwan: Evolution of the “One China” Policy—Key Statements from Washington, Beijing, and Taipei” hal 1

menangnya Partai Komunis di Tiongkok, Negara tersebut berubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Amerika Serikat pada saat itu bersikap secara terbuka menentang Pemerintahan yang menganut ideologi komunisme di Tiongkok. AS berusaha untuk menekan, mengganggu serta melemahkan kekuatan milik Tiongkok dengan membangun hubungan militer, ekonomi dan politik dengan negara-negara yang berdekatan dengan Daratan Tiongkok. AS melihat Tiongkok sebagai *major threat* di kawasan Asia Pasifik dengan pengaruh komunisme seperti USSR di Kawasan Eropa.

Sifat agresif yang ditunjukkan AS kepada Tiongkok bertujuan untuk mencegah Pengaruh komunisme yang di usung oleh USSR semakin menyebar. Oleh karena itu, AS membuat kebijakan luar negeri untuk mencegah pengaruh komunisme yang dikenal sebagai *Containment Policy*. Latar belakang adanya *Containment policy* ini dimulai dengan adanya Doktrin Truman dan Marshall Plan. Doktrin Truman yang dikeluarkan tahun 1947 berisi Amerika Serikat harus membantu rakyat merdeka yang ditindas oleh pihak militer atau pihak asing. Militer dan pihak asing yang disebut Truman jelas mengacu pada Uni Soviet.⁴⁵

Penerapan Doktrin Truman sendiri ada pada Marshall Plan, yaitu bantuan yang diusulkan oleh George Marshall, Menteri Luar Negeri pada masa Truman, kepada negara-negara yang membutuhkan, terutama negara-negara

⁴⁵ Cohen. Warren, 1993 "The Cambridge History of American foreign Relations" Vol IV, *America in the Age of Soviet Power 1945-1991*, New York; Cambridge university Press, hal 11.

Eropa. Total *budget* dari Marshall Plan adalah sebanyak \$17 miliar U.S dollar bagi enam belas negara dalam periode empat tahun. Tujuan dari Marshall Plan sendiri adalah membantu negara-negara Eropa untuk merekonstruksi negaranya yang hancur karena Perang Dunia II, dan juga untuk membendung pengaruh Komunis.

Dalam konteks hubungan AS-Tiongkok saat itu, dampak dari *Containment Policy* tersebut, Amerika Serikat melarang masuknya produk Tiongkok ke AS dan membekukan aset Tiongkok di AS. Sehingga hubungan AS-Tiongkok pun menjadi buruk. Selain itu AS juga membuat garis pertahanan militer di sekitar perbatasan Timur dan Selatan Tiongkok dengan membangun aliansi antar negara-negara di sekitar Tiongkok seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.⁴⁶

4.1.2 Diplomasi Pingpong (AS-Tiongkok)

Sejak Partai Komunis berdiri di Tiongkok pada tahun 1949, AS tidak lagi menjalin hubungan kerja sama dengan Tiongkok. Hubungan keduanya merenggang dan AS mengembargo perdagangan Tiongkok sehingga keduanya tidak lagi menjadi partner dagang. AS mulai menekan Tiongkok dengan menjalin aliansi militer dengan negara-negara yang berdekatan dengan Tiongkok seperti Korea Selatan, Jepang dan Pemerintah Partai Nasionalis di Taiwan. Selain itu AS berinisiasi mendirikan *Southeast Asian Treaty*

⁴⁶U.S.-China Relations Since 1949, diakses melalui http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1950_us_china.htm pada tanggal 8 April 2019

Organization (SEATO) yang saat itu beranggotakan Thailand, Filipina, Vietnam Selatan, Australia dan New Zealand yang bertujuan untuk mencegah penyebaran ideologi komunis di dunia. Terbentuknya SEATO membuat Amerika Serikat dapat menempatkan personil militernya di sekitar Tiongkok terutama di wilayah Korea Selatan, Jepang dan Taiwan.

Amerika Serikat kemudian mengajak para aliansinya untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Bahkan Pemerintah AS melarang penduduknya untuk berwisata mengunjungi daratan Tiongkok. Kebijakan AS untuk mengekang Tiongkok dari dunia internasional selama hampir 20 tahun atau dari tahun 1949 hingga 1960-an memberikan dampak langsung pada perekonomian Tiongkok dan melemahkan pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik.

Namun setelah itu, hubungan AS-Tiongkok perlahan mulai menemui titik terang untuk berdamai. Hal ini dipicu oleh sebuah peristiwa unik yang terjadi pada turnamen olahraga yang diadakan di Jepang. Pada April 1971, Jepang mengadakan Pertandingan kejuaraan Tenis Meja Dunia yang mana AS dan Tiongkok turut berpartisipasi menjadi peserta lomba. Pertandingan Tenis Meja ini menjadi peristiwa bersejarah antara AS-Tiongkok. Peristiwa ini bermula ketika seorang kontingen AS, Glenn Cowan secara tidak sengaja menaiki bus kontingen Tiongkok. Hal yang menarik adalah Zhuang Zedong yakni salah satu kontingen Tiongkok, mengajak Cowan berbincang selama

perjalanan dan mereka pun sempat bertukar Cenderamata.⁴⁷ Meskipun keduanya berasal dari negara yang saling bermusuhan namun hal tersebut tidak menghalangi keduanya untuk saling mengakrabkan diri.

Tidak sampai di situ, berita inipun sempat didengar oleh Mao Zedong dan ia pun berinisiatif untuk mengundang para kontingen AS untuk berkunjung ke Tiongkok. Hal ini mengawali membaiknya hubungan AS-Tiongkok. Setahun berselang yakni pada Februari tahun 1972, dampak dari sikap ramah yang ditunjukkan oleh Mao Zedong direspon oleh Presiden AS Richard Nixon. Presiden Nixon mengunjungi Tiongkok dan bertemu dengan Mao Zedong di Tiongkok dan menghabiskan waktu selama seminggu disana. Presiden Nixon melakukan perjalanan ke Beijing, Hangzhou, dan Shanghai.

Kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Richard Nixon bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara AS-Tiongkok. Pada kunjungannya tersebut Presiden Nixon menandatangani komunike yang dikenal sebagai *Shanghai Communique* bersama Perdana Menteri Zhou Enlai. Dalam Komunike Shanghai tersebut, AS hanya mengakui bahwa baik Taipei dan Beijing sepakat bahwa hanya ada satu Tiongkok. AS juga menegaskan kembali bahwa AS memposisikan dirinya sebagai pihak yang membantu dalam

⁴⁷ Diplomasi Pingpong, Ketidaksengajaan yang Cairkan Hubungan AS – China di akses melalui [https://www.liputan6.com/global/read/3937327/10-4-1971-diplomasi-pingpong-ketidaksengajaan3\2\]1-yang-cairkan-hubungan-as-china](https://www.liputan6.com/global/read/3937327/10-4-1971-diplomasi-pingpong-ketidaksengajaan3\2]1-yang-cairkan-hubungan-as-china) pada 9 april 2019

penyelesaian damai mengenai Taiwan kemudian selanjutnya diserahkan kepada Tiongkok sendiri.

*“The U.S. side declared: The United States acknowledges that all Chinese on either side of the Taiwan Strait maintain there is but one China and that Taiwan is a part of China. The United States Government does not challenge that position. It reaffirms its interest in a peaceful settlement of the Taiwan question by the Chinese themselves. With this prospect in mind, it affirms the ultimate objective of the withdrawal of all U.S. forces and military installations from Taiwan. In the meantime, it will progressively reduce its forces and military installations on Taiwan as the tension in the area diminishes.”*⁴⁸

Kedua belah pihak berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip dalam Komunike Shanghai dan bekerja sama untuk mengurangi konflik bersenjata internasional. AS-Tiongkok saling mengakui satu sama lain dan saling menjaga hubungan satu sama lain. AS mengakui Tiongkok sebagai negara yang berdaulat dan Taiwan merupakan bagian dari daratan utama Tiongkok \serta menghentikan kebijakan yang mengembargo perdagangan Tiongkok ke AS. Pada tahap ini hubungan AS-Tiongkok mulai berkembang dengan melakukan hubungan perdagangan, pertukaran budaya hingga kerja sama dalam peningkatan Pendidikan.

Peristiwa ini pun di istilahkan oleh para pengamat politik sebagai *Rapprochment*. Dalam kamus Oxford, istilah “Rapprochement” merupakan kata serapan dari Bahasa Perancis yakni “Rapprocher” yang berarti “kembali bersama”.⁴⁹ Dalam hubungan internasional, istilah ini dipakai sebagai bentuk

⁴⁸ Text of the Joint Communiqué issued by the United States of America and the People’s Republic of China (February 27 of 1972 in Shanghai), paragraph 12

⁴⁹ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/rapprochement> di akses pada tanggal 8 april 2019

kebijakan luar negeri suatu negara dalam membentuk atau memulai kembali hubungan bilateral suatu negara yang lebih harmonis.

4.1.3 Full Diplomatic Ties Sino-U.S. & One China Policy

Paska Kunjungan Presiden Richard Nixon ke Tiongkok pada 1972, hubungan AS-Tiongkok perlahan semakin membaik dan Isu Taiwan seakan di kesampingkan. Hal ini bertujuan untuk membendung pengaruh Komunisme yang usung USSR semakin meluas selama perang dingin. Presiden Nixon secara terang-terangan mengakui bahwa menjalin hubungan baik dengan Tiongkok merupakan hal yang penting bagi AS lebih dari menjalin hubungan baik dengan USSR.

“Good relationship with China were more important than good relationship with Soviet Union”⁵⁰

Selain itu kedua negara sama-sama memiliki kepentingan dalam menjalin hubungan yang lebih baik. Pada saat itu Amerika Serikat memanfaatkan Tiongkok untuk mengahiri perang di Vietnam dan di sisi lain, Tiongkok mencari dukungan dengan AS untuk melawan USSR yang pada saat itu hubungan mereka mengalami perpecahan, karena terjadi perang antara negeri Kiri atau *Sino-Soviet Border War*.⁵¹ Hal tersebut sempat menyebabkan pergeseran politik dalam sistem internasional pada masa perang dingin.

⁵⁰ Mann, Jim, 1999. *About Face: A History of America's Curious Relationship with China from Nixon to Clinton*. New York: Alfred A. Knopf hal 17

⁵¹The Sino-Soviet Border War: merupakan perang akibat adanya propaganda mengenai sengketa wilayah di perbatasan USSR yang menuduh Tentara Tiongkok telah melanggar wilayah perbatasan dan menyerang pos militer USSR hingga mengakibatkan korban jiwa. Namun di sisi lain Tiongkok menganggap Tentara USSR yang terlebih dahulu melewati perbatasan antar keduanya. di akses melalui

Normalisasi hubungan AS-Tiongkok berlangsung selama hampir satu dekade yakni 8 tahun sejak Diplomasi Pingpong. Hubungan keduanya semakin membaik bahkan sikap AS ke Tiongkok mulai melunak dengan mencabut kebijakan embargo terhadap Tiongkok dan membangun kantor koordinasi (*Liaison Offices*) di Beijing dan Washington pada tahun 1973.⁵² Hubungan keduanya sempat Hiatus akibat mundurnya Presiden Nixon dan mundurnya Pemimpin RRT, Mao Zedong serta Perdana Menteri Zhou Enlai di tahun yang sama yakni pada tahun 1974, digantikan oleh Deng Xiaoping dua tahun berselang. Namun hal tersebut tidak menurunkan kedekatan antar keduanya. Puncaknya pada tahun 1978 di bawah Pemerintahan Presiden AS yang baru Jimmy Carter, Amerika Serikat dan Tiongkok mencapai kesepakatan untuk membangun hubungan diplomasi penuh dan resmi diumumkan pada 1 Januari 1979 melalui Komunike kedua yang dikenal dengan *Normalization Communique*.

Dalam komunike tersebut Amerika Serikat kembali menegaskan bahwa baik Taipei dan Beijing merupakan Satu Tiongkok dan hanya mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai Pemerintahan tunggal. seperti yang tertuang dalam komunike Shanghai dan menghormati *One China Policy* yang di usung oleh Pemerintah Tiongkok di Beijing. Oleh karenanya kebijakan perlindungan pertahanan AS terhadap Taiwan tidak berlaku lagi sebab Taiwan

<https://www.historyanswers.co.uk/history-of-war/a-lancaster-bomber-pilot-describes-the-raid-on-the-tirpitz-and-evading-a-me262/> pada 8 Apr 2019

⁵² U.S. Relations with China 1949-2019 di akses melalui <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china> pada 9 juli 2019

adalah bagian dari Daratan Utama Tiongkok. Dampak Normalisasi tersebut mengubah hubungan AS-Taiwan menjadi Non-Formal dan Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Taiwan berhenti paska di resmikan hubungan diplomatik AS-Tiongkok.

One China Policy adalah prinsip yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok termasuk daratan utama Tiongkok, Tibet, Hong Kong, Macao, Xinjiang, dan Taiwan. Hubungan diplomatik dengan Tiongkok hanya dapat dilakukan apabila ada pengakuan atas *One China Policy*. Prinsip ini kerap dikampanyekan oleh Deng Xiaoping selama beliau menjabat menjadi Perdana Menteri. Prinsip ini menegaskan bahwa Taiwan masih bagian dari Tiongkok sehingga tidak ada hubungan Taiwan dengan negara-negara lain. Secara *de Facto*, Taiwan masih merupakan bagian wilayah terluar Tiongkok.

Prinsip *One China Policy* ini yang kemudian menjadi dasar hukum Tiongkok untuk melakukan Reunifikasi dengan Taiwan dengan mengambil berbagai macam kebijakan di dalam prosesnya termasuk menggunakan kekuatan militernya untuk membuat Taiwan menyerah terhadap Tiongkok. Tiongkok menganggap bahwa tindakan Taiwan merupakan aksi separatistis dan menyatakan bahwa Taiwan merupakan masalah internal negaranya sebab Taiwan merupakan salah satu Provinsi di negara tersebut. Sehingga Tiongkok meminta kepada setiap negara terutama Organisasi PBB untuk tidak ikut mengintervensi masalah ini dan saling menghargai antar sesama anggota PBB.

“We will never permit such a separatist act of creating 'two Chinas' or 'one China, one Taiwan.' All members of the UN should adhere to the purpose and principles of the Charter of the United Nations and related UN resolutions, abide by norms governing international relations, including mutual respect for sovereignty and territorial integrity and non-interference in each other's internal affairs, and never, in any form, support Taiwan's joining the UN or other international organizations whose membership is confined to sovereign states.”⁵³

4.1.4 Hubungan AS-Tiongkok dalam Isu Taiwan 1978-2009

Pembentukan hubungan diplomatik normal AS-Tiongkok bertepatan dengan dimulainya kebijakan Reformasi Tiongkok. Normalisasi hubungan AS-Tiongkok membuat hubungan keduanya kembali harmonis sejak Tiongkok menjadi negara komunis di bawah partai komunisme Mao Zedong. Meskipun demikian, Isu Taiwan tetap menjadi ganjalan hubungan AS-Tiongkok. Apalagi, ketika Pemerintah AS menormalisasi hubungan dengan Tiongkok pada 1979, Kongres AS mengesahkan Taiwan Relations Act (TRA) pada 10 April tahun yang sama sebagai bentuk komitmen AS untuk tetap mendukung Taiwan mencapai kemerdekaannya atas Tiongkok. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa

“ Would maintain the capacity of the United States to resist any resort to force or other forms of coercion that would jeopardize the security, or the social or economic system, of the people on Taiwan ”⁵⁴

⁵³The One-China Principle and the Taiwan Issue di akses melalui <http://www.china.org.cn/english/7956.htm> pada 8 Apr 2019

⁵⁴ Taiwan Relation Act (Public law 96-8,22 U.S.C. 3301 et seq.) di akses melalui <https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/taiwan-relations-act/> pada 25 juni 2019.

Dalam TRA tersebut dikatakan bahwa AS akan tetap menjaga kapasitasnya untuk melawan segala upaya untuk memaksa atau bentuk paksaan lainnya yang akan membahayakan keamanan, atau sistem sosial atau ekonomi rakyat Taiwan. Kebijakan inilah yang menjadikan isu Taiwan semakin rumit dan kompleks karena di satu sisi AS mengakui *One-China Policy* sesuai *Shanghai Communique*, tetapi di sisi lain AS berkewajiban melindungi Taiwan berdasarkan amanat TRA yang ditetapkan oleh kongresnya sendiri. Komitmen AS terhadap hubungannya terhadap Taiwan inilah kerap membuat Tiongkok meradang dan memberikan protes keras. Sejak pengesahan UU Taiwan Relation Act, AS secara konsisten melakukan kerja sama non-formal dengan Taiwan dan sebagian besar merupakan perdagangan senjata.

Tiongkok menganggap AS tidak konsisten dalam menjaga komitmennya yang tertuang dalam *Shanghai Communique*. Tiongkok terus mendesak AS untuk tetap menghargai *One China Policy* dan meninggalkan Taiwan. Salah satu contohnya yakni 7 Juni 1996. Presiden Taiwan Lee Teng-hui untuk pertama kalinya berkunjung ke AS. Dalam pidatonya, Presiden Lee mendesak Tiongkok untuk mengikuti model demokrasi yang dikembangkan Taiwan. Presiden Lee juga menegaskan bahwa Taiwan adalah negara berdaulat, bukan sekadar penerus Dinasti Qing yang ditumbangkan kaum Nasionalis pada 1911.⁵⁵ Tiongkok merespon kunjungan Presiden Lee ke AS dengan kemarahan

⁵⁵ Taiwan's First Free Presidential Vote di akses melalui <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china> pada 20 April 2019

besar. Kemudian Tiongkok menuduh AS yang pada saat itu dipimpin oleh Bill Clinton (1993-2000) sengaja memanfaatkan Taiwan untuk melemahkan Tiongkok, baik secara politik, maupun secara ekonomi. Tiongkok lantas menarik duta besarnya dari AS, membatalkan kunjungan kenegaraan menteri pertahanannya ke Washington, menunda pertemuan tentang kontrol senjata dengan delegasi AS, mengakhiri dialog lintasselat, dan menolak menyetujui duta besar AS yang baru.

Tiongkok juga mengerahkan kekuatan militer ke Selat Taiwan yang berimbas pada krisis di kawasan selat Taiwan. AS kemudian merespon dengan mengirimkan dua kapal perang untuk melindungi Taiwan.⁵⁶ Meski akhirnya pada akhirnya perang tidak terjadi dan hanya menyebabkan ketegangan di Selat Taiwan tetapi peristiwa tersebut mencerminkan disharmoni dalam keharmonisan relasi AS-Tiongkok. Kebijakan yang dilakukan AS tersebut memberikan pesan tersendiri bagi Tiongkok bahwa AS tidak akan menyerahkan Taiwan begitu saja ke tangan Tiongkok. hal ini di rasa perlu dilakukan oleh AS mengingat Taiwan adalah mitra strategis AS untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mengamankan kepentingan negara AS di kawasan Asia-Pasifik.

⁵⁶ Review Tucker, Nancy Bernkopf, 2009. Strait Talk: United States-Taiwan Relations and the Crisis with China. Massachusetts: Harvard University Press. Diakses melalui <https://www.wilsoncenter.org/event/strait-talk-united-states-taiwan-relations-and-the-crisis-china>

4.1.5 Bipolaritas Amerika Serikat – Tiongkok

Sistem Unipolar yang dibangun Amerika Serikat pasca keluar sebagai pemenang perang dingin mulai goyah pasca kebangkitan Tiongkok dan secara perlahan meningkat menjadi pesaing baru AS dalam sistem internasional. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kapabilitas *power* Tiongkok di bidang militer, politik hingga ekonomi. Peningkatan pengaruh Tiongkok semakin tak terbendung, dibantu dengan kekuatan ekonominya yang besar membuat Tiongkok mampu menggeser hegemoni AS sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tiongkok memiliki kepentingan untuk membentuk tatanan politik dan keamanan baru di Asia, paling tidak dalam satu titik ia memiliki pengaruh yang setara dengan AS tentang masalah-masalah kawasan. Hal ini terbukti bagaimana Tiongkok mampu mendominasi pengaruhnya di Kawasan Asia Pasifik mengalahkan AS. Peningkatan kapabilitas Tiongkok tersebut secara tidak langsung menyaingi dan mengancam eksistensi AS yang selama ini menjadi satu-satunya negara Adidaya di dunia.

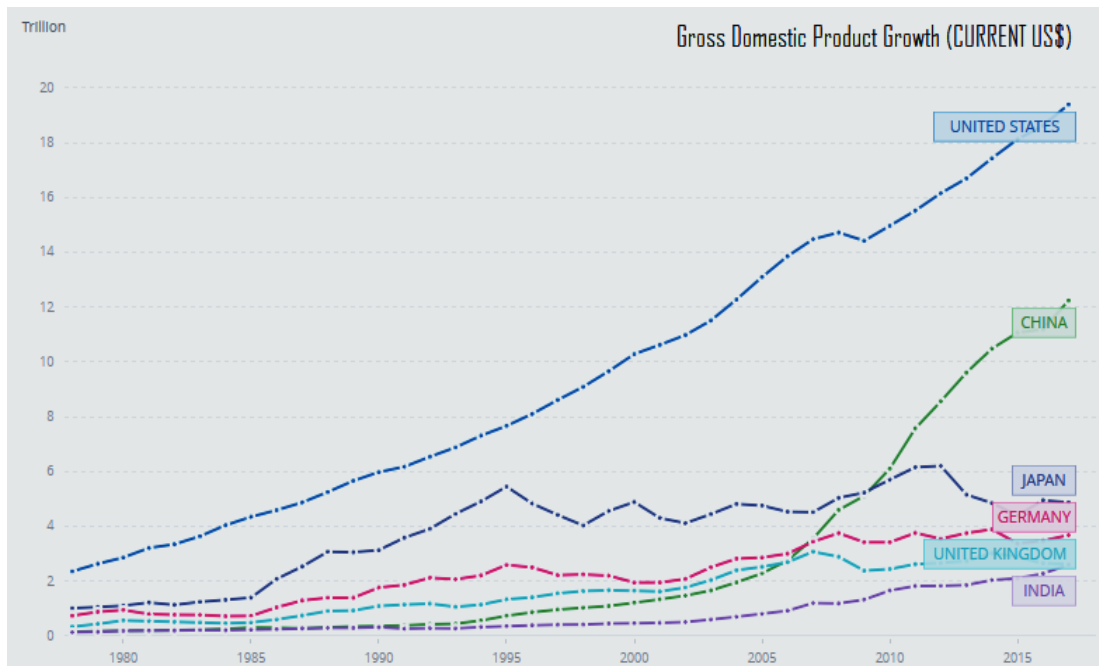
Sejak Deng Xiaoping menjabat sebagai kepala Pemerintahan Tiongkok menggantikan Mao Zedong, Tiongkok secara perlahan mengalami kemajuan di bidang ekonomi dan militer. Hal ini tidak terlepas dari strategi politik Xiaoping dalam memodernisasi Tiongkok. Kebijakan ini disebut dengan “*Open Door*” *Policy* yang mulai diterapkan pada 1978, di bawah kebijakan ini perekonomian

Tiongkok meningkat pesat dengan kenaikan sekitar 15 %.⁵⁷ Tiongkok menjadi lebih aktif dalam Organisasi Internasional terutama di bidang ekonomi seperti *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF) hingga *World Trade Organization* (WTO). Selain itu kebijakan luar negeri Tiongkok mulai membuka diri kepada dunia dengan ikut serta dalam perdagangan internasional bahkan membuka diri untuk investasi asing / *Foreign Direct Investment* (FDI).⁵⁸

Kebijakan yang diterapkan oleh Deng Xiaoping kemudian membuahkan hasil. Data menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Tiongkok mengalami peningkatan dengan rerata 10% dalam 3 dekade terakhir dan menduduki urutan kedua sebagai negara dengan pertumbuhan GDP tertinggi setelah Amerika Serikat. Selain itu pertumbuhan perekonomian Tiongkok mengungguli negara Jepang dan negara-negara di Eropa. Berikut di bawah ini data yang menunjukkan grafik pertumbuhan GDP tertinggi di Dunia mulai dari tahun 1978 hingga 2017.

⁵⁷ Huan,Guocang. China Open Door Policy, 1978-1984. Vol. 39, No. 2, CHINA IN TRANSITION (WINTER 1986), pp. 1-18 , di akses melalui https://www.jstor.org/stable/24356571?readnow=1&seq=1#page_scan_tab_contents pada 9 Apr 2019

⁵⁸ Ibid.



Gambar 4.1. : Data Pertumbuhan GDP Tertinggi di Dunia Sejak 1978-2017

Sumber : World Bank⁵⁹
diolah oleh peneliti

Berdasarkan data grafik di atas, pertumbuhan GDP Amerika Serikat sejak 1978 terus mengungguli dan masih mendominasi negara-negara lain hingga menjadi tertinggi di dunia. Di sisi lain, Tiongkok mulai mengalami pertumbuhan paska kebijakan Xiaoping dalam modernisasi ekonomi Tiongkok. Pertumbuhan GDP-nya tergolong pesat, dalam kurung waktu 3 dekade posisi Tiongkok sudah mengungguli negara-negara Eropa sekelas Jerman dan Inggris bahkan mengungguli negara tetangganya Jepang.

Berkat pencapaian yang di peroleh Tiongkok tersebut, banyak negara yang mulai mendekati dan menjalin kerja sama bilateral. Para ahli berpendapat

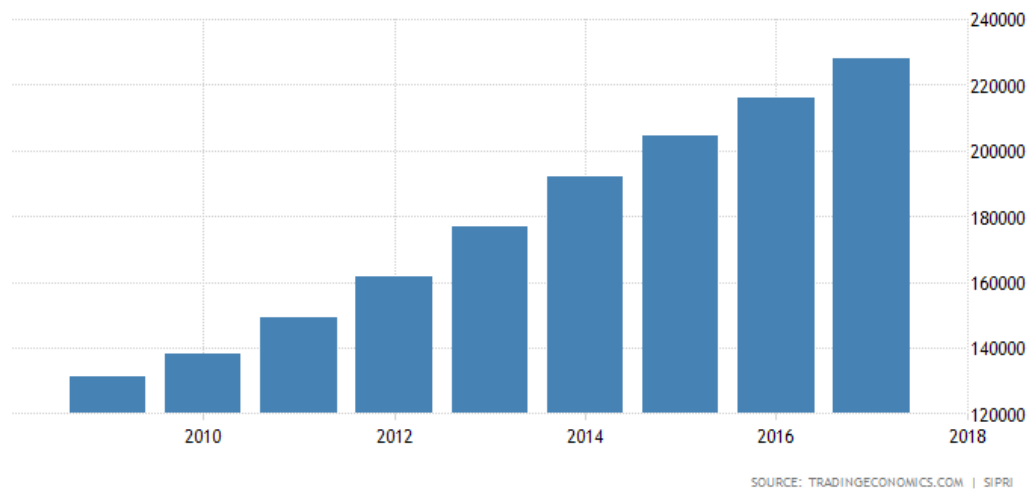
⁵⁹ https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2017&locations=US-CN-JP-DE-GB-IN&start=1978&year_high_desc=true di akses pada 20 april 2019

bahwa identitas Tiongkok telah bergeser menjadi kekuatan besar yang menjadi tantangan dalam kepentingan ekonomi dan perdagangan AS. Selain itu, Kebangkitan Tiongkok jelas menjadikan Tiongkok saat ini sebagai aktor internasional yang penting. Peningkatan pengaruh Tiongkok semakin tak terelakkan, Tiongkok telah menjadi pusat gravitasi baru dalam sistem internasional, sebuah kondisi yang harus diterima oleh AS. Selain mempunyai ambisi yang sangat besar, Tiongkok juga didukung oleh kekuatan ekonomi yang besar pula. Oleh karena itu, sistem Unipolar dan Hegemoni yang terus dijaga oleh AS sekarang mulai bergeser ke arah Bipolar dan munculnya Tiongkok sebagai pesaing baru AS di era sekarang.

Menurut Kenneth Waltz, Bipolaritas merupakan salah satu dari bentuk sistem polaritas kekuatan dalam sistem internasional. Bipolaritas dapat dikaitkan dengan rentang hubungan yang jauh lebih luas antara dua kekuatan dominan. Bipolaritas dapat ditandai oleh pola kerja sama serta persaingan antara dua negara dominan. Sifat hubungan mereka sangat tergantung pada fitur kontingen seperti tingkat saling ketergantungan ekonomi dan keyakinan politik domestik seperti halnya pada struktur sistem internasional.⁶⁰ Dengan kekuatan ekonomi dan militernya meningkat pesat sejak era Xiaoping membuat AS perlu waspada dengan *Power* Tiongkok yang sekarang. Bergesernya sistem unipolar yang di usung oleh AS selaku negara Adidaya tunggal paska perang dingin

⁶⁰ Maher.Richard, 2018. "Bipolarity and the Future of U.S.-China Relations" Vol 133 No 3, *Political Science Quarterly* hal 497

membuat AS kembali harus ditantang oleh rival barunya yakni Tiongkok. Persaingan keduanya meliputi persaingan pasar, peningkatan kapabilitas militer yang terus dilakukan tiap tahunnya seakan mengulang sejarah perang dingin AS-USSR. berikut tabel anggaran pertahanan militer Tiongkok dalam kurun waktu 10 tahun terakhir;



Gambar 4.2. ; Anggaran Pertahanan Militer Tiongkok Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir

Sumber : SIPRI Yearbook & Tradingeconomics.com⁶¹

Berdasarkan tabel di atas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Tiongkok secara konsisten terus meningkatkan anggaran pertahanan militernya. Bahkan berdasarkan data yang diperoleh melalui *World Bank*, Anggaran Pertahanan Militer Tiongkok berada di urutan kedua di bawah Amerika Serikat sebagai negara dengan anggaran pertahanan militer terbesar di

⁶¹ China Military Expenditure di akses melalui <https://tradingeconomics.com/china/military-expenditure> pada 20 April 2019

dunia saat ini. Peningkatan anggaran pertahanan militer yang terus dilakukan Tiongkok didukung dengan perekonomiannya yang berkembang pesat. Oleh karena itu, AS mulai di bayang-bayangi oleh kehadiran Tiongkok dan perlahan mengancam eksistensi AS selaku negara Adidaya.

Meskipun demikian, keduanya masih menjalin hubungan diplomatik dan cenderung dinamis. Bipolaritas baru antara AS-Tiongkok juga telah merubah ruang lingkup konsep Bipolar menjadi lebih kompleks dan lebih meluas. Beberapa literatur mengenai bipolaritas kekuatan merujuk pada sudut pandang sejarah yakni era perang dingin. Sehingga konsep mengenai bipolaritas hanya merujuk pada peristiwa persaingan kekuatan besar pada saat itu antara AS-USSR.

*“There are few studies of bipolarity from an explicitly comparative or historical perspective. While there is a large literature on the operating logic and dynamics of bipolar international systems, theoretical development and empirical applications largely occurred during the context of the Cold War”.*⁶²

Berbeda dengan Bipolaritas AS-USSR, hubungan AS-Tiongkok masih masih tetap terjalin dengan baik dan cenderung relatif stabil. Hal ini disebabkan jarak kedua negara yang terpisah lautan luas sehingga minim kemungkinan terjadi perang. Menurut analisis peneliti, bipolaritas yang baru sangat di pengaruhi oleh era globalisasi dan saling ketergantungan ekonomi. Hal inilah yang menjadi karakteristik dari sistem bipolar yang baru dibanding bipolaritas saat perang dingin yang dimana terjadi perpecahan yang memicu konflik

⁶² Maher.Richard. *Op.Cit.* hal 523

militer. Bipolaritas yang baru tidak lagi berlomba untuk saling berperang ideologi namun persaingan yang meliputi politik, strategis, ekonomi hingga teknologi modern. Hal ini yang kemudian menjelaskan mengapa hubungan AS-Tiongkok masih terus berlangsung hingga sekarang.

4.2 Hubungan Amerika Serikat-Taiwan

Hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan telah terjalin selama lebih dari 60 tahun. Hubungan AS-Taiwan bermula sejak Perang Korea di tahun 1950. Namun pada saat itu AS berfokus pada Perang Korea yang juga melibatkan USSR dan Tiongkok yang berpihak pada Korea Utara sehingga hubungan AS-Taiwan belum nampak secara signifikan dan terfokus pada stabilitas keamanan di sekitar Kawasan Asia Timur. Kehadiran AS di Kawasan Asia Pasifik yang berperan sebagai polisi dunia pasca keluar sebagai pemenang Perang Dunia II didasari oleh kepentingannya yang ingin menyebarkan ideologi liberal dan menghentikan penyebaran ideologi komunisme yang mulai masuk ke kawasan Asia.

Perang Korea berlangsung selama 3 tahun yang terhitung sejak bulan Juni 1950 hingga Juli 1953.⁶³ Perang ini pada mulanya merupakan perang saudara antara Korea di bagian Selatan dan Utara namun kemudian meluas menjadi Perang Trans-nasional yang melibatkan negara lain seperti Tiongkok, USSR dan Amerika Serikat dll. Perang ini juga sering disebut dengan “*Proxy War*” atau dapat di istilah sebagai “perang yang

⁶³ Intervensi Amerika Serikat dalam Perang Korea di akses melalui <http://ir.binus.ac.id/2018/12/06/intervensi-amerika-serikat-dalam-perang-korea/#> pada 9 Juli 2019

dimandatkan” yang ditunggangi oleh dua kekuatan besar AS dan USSR sebagai dampak Perang Dingin.

Pada saat itu Taiwan membantu AS dalam mendukung pertahanan Korea Selatan. Di satu sisi Tiongkok mendukung pasukan Korea Utara yang sama-sama beraliran Komunis⁶⁴. Kerja sama AS-Taiwan bermula dari kepentingan Amerika Serikat yang berusaha menekan pengaruh komunisme Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik selama Era Perang Dingin. Paska Perang Korea berakhir, hubungan AS-Taiwan tetap berlangsung dan AS bersedia bekerja sama membantu Taiwan mengatasi serangan militer milik Tiongkok. Konflik ini mendapat perhatian oleh AS yang disebabkan karena wilayah Taiwan merupakan wilayah yang strategis bagi AS untuk membatasi gerak gerik Tiongkok.

Kerja sama keamanan AS-Taiwan tertuang dalam *US-ROC Mutual Defense Treaty* yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Harry Truman pada tahun 1954. Pada masa Pemerintahan Presiden Harry Truman AS melakukan perjanjian dengan Taiwan dalam pertahanan yang bertujuan untuk menanggulangi ancaman dari Tiongkok dalam Krisis Selat Taiwan. Diantaranya perjanjian *United State-Republic of China (US-ROC) Mutual Defense Treaty* dan MAAG (*Military AS Advisory Group*) yakni penempatan personel militer AS di Taiwan. Amerika Serikat sebagai inisiator terbentuknya hubungan kerja sama militer ini bertujuan untuk mengekang *power* Tiongkok dan sekaligus membantu perlawanan Taiwan menghadapi Tiongkok

⁶⁴ Korean War Breaks Out di akses melalui <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china> pada tanggal 8 april 2019

Perjanjian *U.S.-ROC* merupakan perjanjian formal pertahanan bersama antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Taiwan. Di dalam perjanjian AS-Taiwan, AS bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan Taiwan. AS memberikan bantuan kepada militer Taiwan, seperti sistem persenjataan canggih, dukungan perangkat lunak yang besar, serta mengerahkan beberapa pasukan militernya ke selat Taiwan untuk menjaga keamanan Taiwan dari ancaman Tiongkok.⁶⁵

Semenjak Perjanjian pertahanan AS-Taiwan resmi dibuat pada 1954, AS banyak berperan dalam membantu militer Taiwan terutama saat Krisis di Selat Taiwan. Diantaranya seperti mengirimkan Armada militer AS di selat Taiwan, penempatan personil militer di pulau-pulau terluar wilayah Taiwan yakni pulau Mazu dan Jinmen. Ketegangan di selat Taiwan sempat terhenti pada tahun 1955 akibat ancaman senjata nuklir yang dilakukan AS terhadap Tiongkok yang akhirnya menarik Pasukannya untuk sementara. Namun ketegangan kembali berlanjut di tahun 1958, Pasukan Tiongkok kembali memprovokasi Taiwan dengan kembali menyerang pulau Jinmen dan Mazu. Konflik bersenjata antara Tiongkok -Taiwan terus berlanjut hingga bertahun-tahun. Namun pada tahun 1970an, Ketegangan konflik Tiongkok-Taiwan perlahan mereda setelah AS mulai berpindah haluan dan menormalisasi hubungannya dengan Tiongkok.

Hal ini kemudian mempengaruhi Hubungan AS-Taiwan secara signifikan. Hubungan AS-Taiwan pun perlahan mengalami menurun semenjak Pemerintah AS

⁶⁵The United States and Taiwan's Defense Transformation di akses melalui <https://www.brookings.edu/opinions/the-united-states-and-taiwans-defense-transformation/> pada 8 Apr 2019.

mengeluarkan kebijakan untuk menormalisasi hubungan luar negerinya dengan Tiongkok. Sejak kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Richard Nixon ke Tiongkok dan membuat Komunike Shanghai pada tahun 1972 mengubah pola perpolitikan di Kawasan Asia-Pasifik, hubungan diplomatik antara AS-Taiwan menjadi terganggu. Meskipun demikian kerja sama pertahanan masih terus dilakukan antara AS-Taiwan namun fokus AS beralih ke Tiongkok yang mulai memperbaiki hubungannya. Puncaknya ketika AS-Tiongkok resmi menjalin hubungan diplomatik pada 1 Januari 1979, mengakibatkan *Mutual Defense Treaty US-ROC* berakhir dan status hubungan AS-Taiwan menjadi Non-formal.

Hubungan AS-Taiwan kembali terjalin pada April 1979 atau empat bulan paska Presiden Jimmy Carter mengumumkan peresmian hubungan diplomasi AS-Tiongkok. Menurut Presiden Carter, Taiwan dianggap penting oleh AS dalam usahanya membendung pengaruh Tiongkok khususnya dalam bidang perdagangan.⁶⁶ Oleh karena itu Pemerintah Amerika Serikat membuat kebijakan unik yang di usung oleh *House of representative U.S.* dengan sebuah membuat landasan baru yakni di bawah kerangka UU domestik Amerika Serikat yang di sebut dengan *Taiwan Relations Act* (TRA). Undang-undang ini merupakan kebijakan yang dibuat AS melalui kongres AS pada bulan April 1979.⁶⁷ Meskipun demikian kebijakan ini hanya berasal dari AS dan bukan perjanjian formal sehingga hubungan AS-Taiwan tetap tidak resmi namun berlandaskan ketentuan UU domestik Amerika Serikat. Selain itu terdapat Six

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Kerry Dumbaugh, Report *Taiwan: Texts of the Taiwan Relations Act, the U.S. - China Communiques, and the "Six Assurances"*, Congressional Research Service

Assurances yakni *Formal Statement* yang juga di keluarkan oleh AS dalam mempertegas komitmen AS untuk tetap menjalankan TRA pada masa Pemerintahan Presiden Ronald Reagan tahun 1982.

4.2.1 Taiwan Relations Act

Taiwan Relations Act (TRA) adalah hukum domestik yang unik dari Amerika Serikat. Pemerintah AS menetapkan TRA sebagai landasan hukum untuk hubungan luar negeri AS dengan Taiwan. Tujuan dibuatnya TRA yakni agar AS masih dapat melakukan kerja sama Non-formal dengan Taiwan demi menjaga keamanan dan mencegah tindakan agresif Tiongkok dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan sehingga hubungan AS-Taiwan masih dapat terjalin seperti hubungan perdagangan, Kebudayaan dan Hubungan non-formal Lainnya. Diantara pasal Taiwan Relation Act yang jelas sekali menerangkan hubungan Amerika Serikat-Taiwan tercantum dalam Pasal 2 (b), dimana AS memandang berkewajiban untuk memberikan berbagi bantuan dan akan melindungi Taiwan dari berbagai ancaman keamanan, termasuk embargo dan baikot ekonmoni, dalam TRA disebutkan

*“Consider any effort to determine the future of Taiwan by other than peaceful means, including by boycotts or embargoes, a threat to the peace and security of the Western Pacific area and of grave concern to the United States; . . . the United States will make available to Taiwan such defense articles and defense services in such quantity as may be necessary to enable Taiwan to maintain a sufficient self-defense capability.”*⁶⁸

⁶⁸ “Taiwan Relations Act: Public Law 96-8, 96th Congress,” January 1, 1979 diakses melalui http://www.ait.org.tw/en/about_ait/tra/ pada 8 Apr 2019

Di bawah TRA, AS dapat melakukan beberapa kebijakan diantaranya; (1) Memelihara dan mengembangkan hubungan kultural, perdagangan dan lainnya secara ekstensif dan bersahabat diantara AS dan rakyat Taiwan. (2) mendeklarasikan perdamaian dan stabilitas di area kepentingan politik, keamanan dan ekonomi AS dan di area yang menjadi perhatian internasional. (3) memperjelas masa depan Taiwan akan ditentukan oleh cara-cara damai, menganggap bahwa usaha-usaha yang menentukan masa depan Taiwan, Selain cara-cara damai, termasuk boikot atau embargo, merupakan ancaman keamanan bagi negara-negara di Pasifik Barat dan menjadi perhatian penting AS, (4) menyediakan persenjataan defensif untuk Taiwan, (5) meyakinkan hak untuk melawan segala macam bentuk serangan atau koersi yang akan mengancam keamanan atau sistem ekonomi dan sosial rakyat Taiwan.⁶⁹

4.2.2 The Six Assurances

Pada awal Presiden Ronald Reagan menjabat sebagai Presiden Amerikat Serikat yakni pada tahun 1981, beliau berfokus pada negosiasi dengan Tiongkok mengenai kerja sama perdagangan senjata ke Taiwan. Hal ini dikarenakan adanya sikap tidak senang yang ditunjukkan oleh Tiongkok ke pada AS terhadap hubungannya dengan Taiwan. Bahkan Tiongkok mengancam untuk menurunkan hubungan diplomatik antar kedua yang telah terjalin. Pemerintah AS pun merespon ancaman yang di keluarkan Tiongkok

⁶⁹ James C. P. Chang, U.S Policy Toward Taiwan, <http://www.wcfia.harvard.edu/fellows/papers/200001/chang.pdf>, diakses tanggal 29 oktober 2018

dan mengambil kebijakan untuk memenuhi permintaan Tiongkok agar tetap terjaga hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok. Hasilnya, pada 17 Agustus 1984 Pemerintah AS mengeluarkan Komunike baru yang menyatakan Pemerintah AS tidak berusaha untuk melakukan kebijakan jangka panjang penjualan senjata ke Taiwan, penjualan senjata ke Taiwan tidak akan melebihi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan ia berniat untuk mengurangi penjualan senjata secara bertahap ke Taiwan, yang mengarah pada periode waktu ke resolusi akhir yang di sebut dengan *Communique of August*.

*“That it does not seek to carry out a long-term policy of arms sales to Taiwan, that its arms sales to Taiwan will not exceed, either in qualitative or in quantitative terms, the level of those supplied in recent years since the establishment of diplomatic relations between the United States and China, and that it intends to reduce gradually its sales of arms to Taiwan, leading over a period of time to a final resolution”*⁷⁰

Meskipun Presiden Reagan setuju untuk menandatangani komunike tersebut, namun ia tidak sepenuhnya berpihak pada Tiongkok dan tetap menjaga hubungannya dengan Taiwan. Pemerintah AS akan bersedia mengurangi penjualan senjatanya ke Taiwan dengan jaminan komitmen Tiongkok untuk melakukan solusi damai dengan Taiwan tanpa menggunakan kekuatan militer. Presiden Reagan menyatakan bahwa AS tidak akan meninggalkan Taiwan dengan memberikan enam jaminan/ *Six assurances* kepada Taiwan untuk tetap percaya kepada Amerika Serikat.

⁷⁰ Shirley A. Kan, Report *China/Taiwan: Evolution of the 'One China' Policy-Key Statements from Washington, Beijing and Taipei*, Congressional Research Service, September 7, 2006, p. 41.

*“The U.S. willingness to reduce its arms sales to Taiwan is conditioned absolutely upon the continued commitment of China to the peaceful solution of Taiwan-PRC differences. It should be clearly understood that the linkage between these two matters is a permanent imperative of U.S. foreign policy. In addition, it is essential that the quantity and quality of the arms provided Taiwan be conditioned entirely on the threat posed by the PRC. Both in quantitative and qualitative terms, Taiwan's defense capability relative to that of the PRC will be maintained”*⁷¹

Singkatnya Six Assurances adalah *Formal Statement* yang disampaikan langsung oleh Presiden Reagan terhadap publik Taiwan bahwa AS akan tetap menaati *Taiwan Relation Act (TRA)*. Enam Jaminan ini merupakan bentuk ketegasan AS yang tidak akan meninggalkan kepulauan Taiwan dan tidak memihak Tiongkok. *Six Assurances* bukan sebuah perjanjian baru yang menggantikan *Taiwan Relation Act (TRA)*, namun sebuah penegasan kembali tetap komitmen AS terhadap Taiwan. Presiden Ronald Reagan menyuruh utusannya James Lilley untuk menyampaikan pesan kepada pemimpin Taiwan Chiang Ching-kuo, bahwa AS tidak akan meninggalkan pulau itu, dan tetap memegang teguh janji yang ada dalam TRA.⁷² Amerika Serikat konsisten melanjutkan perdagangan senjatanya ke Taiwan sesuai dengan hukum dalam TRA yang menyatakan bahwa stabilitas dan perdamaian dikawasan Taiwan merupakan bagian dalam kepentingan AS. pada tanggal 14 juli 1982 AS membuat sebuah jaminan terhadap Taiwan yaitu

⁷¹ Ibid, hal 43

⁷² Heritage. President reagans six assurances Taiwan and their meaning today. <https://www.heritage.org/asia/report/president-reagans-sixassurances-taiwan-and-their-meaning-today>. diakses pada 8 Apr 2019

The Six Assurances. Berikut isi enam jaminan yang di keluarkan oleh AS kepada Taiwan;

1. Tidak setuju untuk menetapkan waktu tertentu untuk mengahiri penjualan senjata ke Taiwan
2. Tidak setuju untuk melakukan konsultasi sebelumnya dengan Beijing mengenai penjualan senjata ke Taiwan
3. Tidak akan memainkan peran mediasi apapun antara Taipei dan Beijing
4. Tidak akan setuju untuk merevisi Taiwan Relations Act
5. Tidak akan mengubah posisi lama saya pada masalah kedaulatan atas Taiwan
6. Tidak akan berusaha untuk memberikan tekanan pada Taiwan untuk melakukan negosiasi dengan Tiongkok.⁷³

Taiwan Relations Act dan *Six Assurances* memberi AS dan Taiwan sebuah landasan hukum yang kuat untuk mempertahankan kerja sama keamanan yang mereka buat paska hubungan AS-Taiwan menjadi non-formal. Pada dasarnya kemitraan Amerika Serikat untuk tetap membela Taiwan sangat tergantung pada seberapa pentingnya kemerdekaan Taiwan, dimana dalam hal ini juga dengan pertimbangan kebijakan regional AS sehubungan dengan

⁷³ The "Six Assurances" to Taiwan ; 1.)Had not agreed to set a date for ending arms sales to the Republic of China; 2.)Had not agreed to hold prior consultations with the PRC regarding arms sales to the Republic of China;3.)Would not play a mediation role between the PRC and the Republic of China;4.)Would not revise the Taiwan Relations Act;5.)Had not altered its position regarding sovereignty over Taiwan; and6.)Would not exert pressure on the Republic of China to enter into negotiations with the PRC. di akses melalui <http://www.taiwandocuments.org/assurances.html> pada 9 Apr 2019

Tiongkok. Hal ini semata-mata bertujuan untuk membendung kekuatan Tiongkok di Kawasan Asia-Pasifik.

Walaupun hubungan diplomatik AS-Tiongkok telah terjalin, namun AS tetap menjaga komitmennya untuk terus melindungi Taiwan dan menjalin kerja sama non-formal dengan Taiwan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari motif AS untuk mencegah dan mencoba melemahkan *power* Tiongkok secara halus. Hubungan AS-Taiwan tentu mendapatkan respon keras dari Tiongkok yang dianggap mencampuri urusan domestic Tiongkok dengan Taiwan dan mengganggu proses unifikasi Tiongkok dengan Taiwan. AS memanfaatkan sikap Taiwan yang ingin memerdekakan diri secara utuh sebagai sebuah negara tanpa belenggu dari Tiongkok. AS beralasan tindakan ini sebagai bentuk *prevention* terjadinya konflik bersenjata di Kawasan selat Taiwan tersebut. melalui perannya sebagai *peace keeper* di kawasan selat Taiwan, AS dapat memonitoring tindakan Tiongkok dan membantu Taiwan dalam memodernisasi pertahanan militernya.

4.3 Kerja sama Perdagangan Senjata AS-Taiwan

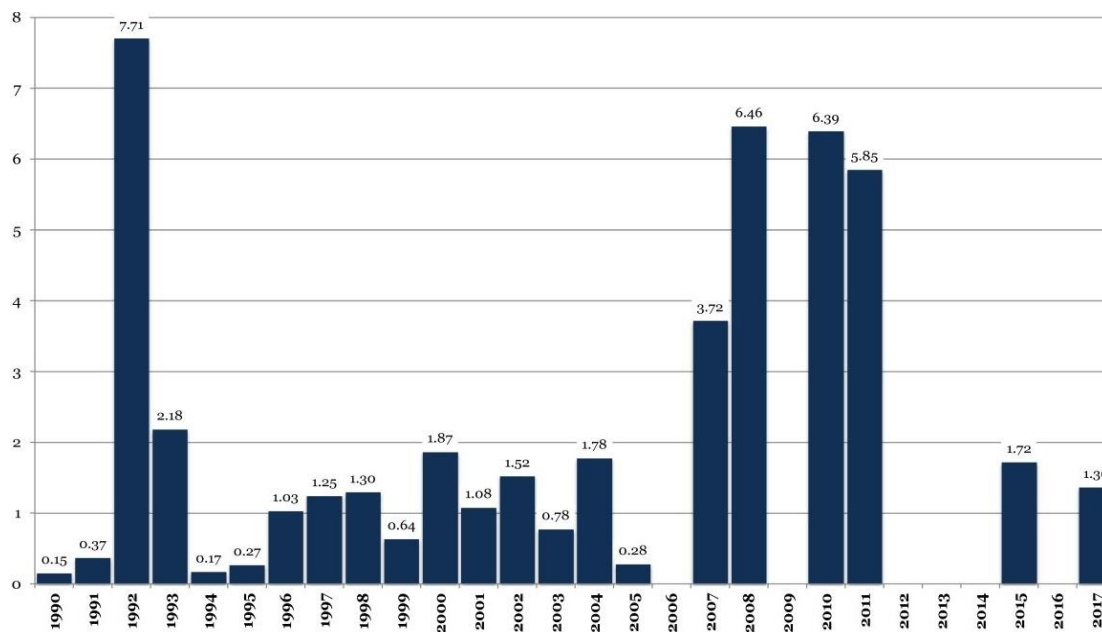
Meskipun hubungan resmi AS-Taiwan telah berakhir paska AS menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok namun, AS tetap melanjutkan kerja sama perdagangan senjata ke Taiwan di bawah kerangka kebijakan *Taiwan Relations Act* (TRA). Menurut UU TRA, kebijakan AS untuk melanjutkan perdagangan senjata ke Taiwan bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Kawasan adalah sah untuk dilakukan. Di sisi lain, kerja sama perdagangan senjata tersebut memberikan

keuntungan bagi Taiwan untuk meningkatkan dan memodernisasi kekuatan militernya sehingga Taiwan dapat merasa lebih aman menghadapi ancaman dari Tiongkok. Setiap tahunnya Tiongkok terus meningkatkan budget militernya dan hal ini menyebabkan Taiwan merasa was-was dan terancam. Sehingga Pemerintah Taiwan juga turut meningkatkan budget militernya dan bergantung pada AS sebagai penyuplai peralatan militer hingga persenjataan sebagai bentuk *Self Defense*.

Awal mula Perdagangan Senjata AS-Taiwan tercatat sejak *Taiwan Relation Act* resmi diterapkan. Namun sebelum tahun 1979 atau sebelum terbentuknya *Taiwan Relation Act*, belum ada data yang secara spesifik menunjukkan kerja sama Perdagangan Senjata oleh AS terhadap Taiwan maupun rincian persenjataan yang di impor ke Taiwan meskipun AS-Taiwan telah menjalin hubungan militer dalam kerangka U.S-ROC *Mutual Defense Treaty*. Pemerintah AS secara terbuka mempublikasikan kesepakatan penjualan senjata AS kepada Taiwan. Presiden Jimmy Carter merupakan Presiden AS pertama yang tercatat melakukan kesepakatan perdagangan senjata dengan Taiwan paska *Taiwan Relation Act* (TRA) resmi diterapkan dengan mengirimkan 500 buah misil tipe AGM-65B Maverick dengan total biaya \$ 20 juta dolar di tahun 1979.⁷⁴ Beberapa tahun setelahnya Jimmy Carter digantikan oleh Ronald Reagan menjadi Presiden AS selanjutnya (Periode 1981-1989). Meskipun telah berganti kepemimpinan, Pemerintah AS tetap melanjutkan perdagangan senjatanya ke Taiwan. Tercatat selama Pemerintahan Ronald Reagan, total nilai paket senjata yang

⁷⁴ Chinese Reactions to Taiwan Arms Sales , Report US-Taiwan Business Council Project 2049 Institute, 2012 hal 59

disepakati oleh AS yakni \$ 1.58 miliar dolar yang meliputi Pesawat tempur tipe F-104G hingga pesawat C-130 hercules dan Persenjataan Artileri lainnya.⁷⁵ Kebijakan ini secara rutin dilakukan oleh Pemerintah AS sejak tahun 1979 hingga sekarang. Berikut di bawah ini data nilai perdagangan senjata AS ke Taiwan sejak tahun 1990 yang di publikasikan oleh Pemerintah Amerika Serikat;



Gambar 4.3 : Nilai perdagangan senjata AS ke Taiwan 1990-2017 (Miliar US\$)

Sumber: CRS Report 2014⁷⁶

Data di atas merupakan nilai perdagangan atau transaksi senjata AS ke Taiwan yang telah di rangkum sejak tahun 1990 secara terperinci oleh Buku Laporan Kongres yang dirilis melalui *Congressional Research Service* (CRS). Dari data yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa Amerika Serikat secara konsisten terus melakukan transaksi perdagangan senjata dengan Taiwan hingga tahun 2017 yang berarti telah dilaksanakan

⁷⁵ Ibid, hal 60

⁷⁶ Kan, A. Sherly. Report. *Taiwan: Major U.S. Arms Sales Since 1990* Congressional Research Service August 29, 2014

oleh 4 era Pemerintahan Presiden Amerika Serikat secara beruntun yakni George H.W Bush (1989-1993), Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009) hingga Barack Obama (2009-2017). Transaksi terbesar perdagangan senjata AS ke Taiwan terjadi pada tahun 1992 yakni pada masa Pemerintahan Presiden George H.W. Bush dengan nilai US\$ 7.71 miliar dan transaksi terkecil juga terjadi pada masa Pemerintahan George H.W Bush yakni pada tahun 1990 sebesar US\$ 0.15 miliar.

Kemudian pada masa Pemerintahan Bill Clinton nilai transaksi yang disepakati relatif rendah dibandingkan Presiden AS lainnya meskipun terus dilakukan pertahunnya selama ia menjabat. Lalu pada masa Pemerintah George W Bush, AS tetap melakukan transaksi perdagangan senjata ke Taiwan setiap tahunnya dan yang terbesar terjadi pada tahun 2008 semasa ia menjabat dengan nilai US\$ 6.46 miliar. Kemudian yang terakhir pada masa Pemerintahan Barack Obama, semasa ia menjabat AS hanya melakukan 4 kali transaksi perdagangan senjata ke Taiwan dan yang terbesar bernilai US\$ 6.39 miliar pada tahun 2010.

Meskipun Amerika Serikat telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan menandatangani tiga buah komunike diantaranya *Communique Shanghai* (1972), *Normalization Communique* (1979) dan *Communique of August* (1982) yang telah disepakati bersama. Namun, AS tetap menjaga komitmennya dengan Taiwan dan tetap menjaga kepercayaan Taiwan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kepulauan tersebut. di sisi lain, AS berusaha untuk membendung kekuatan Tiongkok yang mulai mengancam eksistensi AS sebagai negara adidaya. Bagi Taiwan sendiri, kerja sama perdagangan senjata AS-Taiwan memberikan dukungan yang kuat di segi

militer Taiwan dalam menghadapi Tiongkok dan juga usaha mencapai kemerdekaan sebagai negara tanpa di bayang-bayangi oleh Tiongkok.

Pada tahun 1990an Tiongkok mulai mengembangkan infrastruktur rudal balistik jarak pendek / *Short-range ballistic missile* (SRBM) yang di klaim sebagai yang terbesar dan tercanggih di Dunia saat itu. Hal ini dilakukan oleh Tiongkok sebagai bentuk respon dan kecaman atas sikap AS yang terus menyuplai persenjataan Taiwan. Pada saat itu, AS yang dipimpin George H.W Bush (1989-1993) mengirimkan persenjataan canggih seperti Torpedo MK-46, pesawat C-130 *Hercules* hingga pesawat tempur F-16 pada tahun 1992.⁷⁷ Pemerintah Tiongkok secara terang-terangan memperingati Taiwan dan menempatkan pasukan militer Tiongkok di perbatasan selat Taiwan.

Peringatan Tiongkok tersebut tidak mempengaruhi sikap Taiwan dan tetap membeli persenjataan canggih dari AS. Pada tahun 1996 Presiden Bill Clinton (1993-2001) yang menggantikan George H.W Bush, kembali menyetujui permintaan Taiwan dan mengirimkan 465 misil Stringer dan 55 misil *Dual-Mounted Stinger Launcher*. Tiongkok kembali mengecam sikap AS yang cenderung membantu dan mendorong Taiwan untuk menolak reunifikasi dengan Tiongkok. Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok saat itu, Shen Guofang berpendapat bahwa penjualan misil Stinger ke Taiwan telah jelas melanggar *Communique* 1982 yang telah di ratifikasi bersama dan menganggap AS tidak konsisten mengenai komitmennya sendiri.

⁷⁷ Chinese Reactions to Taiwan Arms Sales, 2012, Report “US-Taiwan Business Council Project 2049 Institute”, hal 17.

*“The sale of Stingers to Taiwan breached the 1982 Joint Communiqué and we have taken note of the fact that the US has always called for the non-proliferation of weapons, but it is very irresponsible for the US to sell advanced weapons to such a sensitive region at such a sensitive time.”*⁷⁸

Dari perspektif Tiongkok, menyuplai persenjataan ofensif sekelas misil serta membantu Taiwan dalam pertahanan rudal tentunya secara jelas memperlihatkan bahwa AS secara jelas memihak Taiwan. Keterkaitan militer seperti itu di nilai Tiongkok sebagai kembalinya Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Taiwan / U.S.-ROC *Mutual Defense Treaty* pada tahun 1954.

Pada Pemerintah Bill Clinton, sejak 1994 hingga 2000 Pemerintah AS telah mengirimkan persenjataan canggih ke Taiwan diantaranya AN / ALQ-184 jammer perlindungan diri, Misil anti-kapal Harpoon yang diluncurkan udara, *AGM-65G Maverick*, Misil air-to-surface, *Pathfinder/Sharpshooter Navigation* dan lain sebagainya. Hal ini terus dikeluhkan oleh Tiongkok dan meminta AS untuk menyudahi kerja sama dengan Taiwan. Namun, meskipun Tiongkok terus mengecam perdagangan senjata yang dilakukan AS ke Taiwan. Tiongkok belum berani mengambil langkah tegas dan memberikan sanksi kepada AS.

Setelah 2 Periode menjabat Presiden Bill Clinton akhirnya turun dan digantikan oleh George W. Bush (2001-2009) sebagai Presiden AS yang baru. Sama seperti Presiden terdahulu, Pemerintah AS tetap melakukan perdagangan senjata dengan Taiwan di bawah UU *Taiwan Relation Act*. Pada awal Pemerintahan Bush, AS menyepakati paket persenjataan yang diminta oleh Taiwan yang diantaranya yakni

⁷⁸ Ibid, hal 17

Kidd class destroyers , pesawat tempur P-3C Orion anti-submarine, dan kapal selam diesel, misil Javeline anti-Tank dll. Presiden Bush menyampaikan sikapnya terhadap isu di selat Taiwan. Menurut Presiden Bush, AS berkomitmen untuk menyediakan senjata defensif dan layanan defensif ke Taiwan untuk membantu Taiwan memenuhi kebutuhan pertahanan diri. Selanjutnya ia menambahkan bahwa ia hanya melakukan apa yang di perlukan Taiwan untuk membela diri dan Tiongkok harus memahami itu.

*“Of course, the United States is also committed to make available defensive arms and defensive services to Taiwan in order to help Taiwan meet its self-defense needs and I have said that I will do what it takes to help Taiwan defend herself, and the Chinese must understand that”*⁷⁹

Tiongkok pun kembali memberikan respon tegas dan menyebut tiga Komunike Bersama yang ditandatangani antara AS dan Tiongkok sebagai pangkalan hubungan AS-Tiongkok. Dalam Komunike ini, AS secara resmi mengakui *One China Policy* dan Tiongkok sebagai satu-satunya Pemerintah yang sah. Oleh karena itu, menjual senjata ke Taiwan dianggap oleh Tiongkok sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Tiongkok. Selain itu, Tiongkok menyinggung perihal persenjataan yang di jual ke Taiwan yang bukan merupakan senjata defensif seperti perlengkapan pesawat tempur F-16, misil launcher hingga kapal selam seperti yang tertera dalam *Taiwan Relation Act* (TRA) yang dibuat oleh Kongres Amerika Serikat. Dalam hal ini, Tiongkok merujuk pada TRA, pasal 2(b) ayat 5 yang berbunyi “Ini adalah kebijakan Amerika Serikat memberi Taiwan senjata yang bersifat defensif ”.⁸⁰ di satu sisi,

⁷⁹ Kan,A.Sherly. *Op.Cit* Hal 8

⁸⁰ “Taiwan Relations Act: Public Law 96-8, 96th Congress,” January 1, 1979 diakses melalui http://www.ait.org.tw/en/about_ait/tra/ pada 10 juli 2019

Tiongkok menolak mengakui TRA tersebut sebagai landasan hukum hubungan AS-Taiwan. Penolakan TRA tersebut mengacu pada normalisasi hubungan AS-Tiongkok yang di dasari atas ratifikasi komunike bersama. Kemudian meskipun TRA digunakan AS sebagai legalitasnya untuk melakukan hubungan bilateral dengan Taiwan, namun perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian internasional sebab status Taiwan yang belum sepenuhnya legal sebagai negara yang berdaulat.

Meskipun terus mendapat kecaman keras dari Tiongkok, Presiden Bush tetap melanjutkan dan menjaga komitmennya dengan Taiwan. Berdasarkan data penjualan senjata yang dilakukan AS terhadap Taiwan menunjukkan bahwa nilai total penjualan barang dan jasa pertahanan AS ke Taiwan dari 2004 hingga 2007 berjumlah US\$ 4,3 miliar dan pada 2008 saja, Presiden Bush menyetujui kesepakatan penjualan senjata yang bernilai lebih dari US\$ 6,4 miliar perlengkapan senjata yang diantaranya meliputi misil Javelin, AGM-114M3 Hellfire II *anti-armor missiles to equip AH-1W* dan helikopter OH58D, helikopter tempur *Black hawk*.⁸¹ Rincian jenis persenjataan yang di setuju oleh AS sejak 1990 secara lengkap tertera pada Lampiran.

Pada tahun 2008, Pemerintah Tiongkok sempat mengambil sikap tegas kepada AS dengan menunda pertemuan bilateral AS-Tiongkok yang membahas mengenai kerja sama militer pada saat itu. Namun sanksi tersebut hanya bertahan selama 4 bulan saja dan pertemuan bilateral AS-Tiongkok yang membahas mengenai kerja sama militer kembali di adakan.⁸² Namun meskipun Tiongkok mulai berani

⁸¹ Kan, A. Sherly. *Op.Cit.* hal 58.

⁸² Hickey, D. & Zhou, Y., 2010. Chinese Mainland-U.S.-Taiwan Triangular Relations since 2000: A Perspective of Complex Interdependence. In: S. Guo & B. Guo, eds. *Thirty Years of China-U.S. Relations*. Plymouth: Lexington Books, pp. 139-60 hal 154

mengambil sikap tegas kepada AS, hal ini tidak menghentikan perdagangan senjata AS ke Taiwan. Bahkan setelah Presiden Bush digantikan oleh Obama pada tahun 2009, Pemerintah AS tetap melanjutkan mengirimkan paket senjata di tahun 2010 yang bernilai US\$ 6,4 miliar dolar.

Pada dasarnya tujuan Pemerintah AS untuk melanjutkan penjualan senjata ke Taiwan tidak semata-mata didasarkan pada komitmen AS untuk membantu Taiwan mempertahankan diri seperti yang tertera pada *Taiwan Relation Act* (TRA). Di samping manfaat ekonomi yang diperoleh dari penjualan senjata besar ke pulau Taiwan tersebut, Pemerintah AS masih terus menganggap Taiwan sebagai mitra strategis terhadap Tiongkok jika terjadi pergesekan konflik yang tidak menguntungkan di masa depan ataupun menyulut perang antara AS dan Tiongkok.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Respon Tiongkok Terhadap Perdagangan Senjata AS-Taiwan Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama (2009-2017)” pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan bahwa bentuk respon yang dilakukan oleh Tiongkok adalah menolak perdagangan senjata AS terhadap Taiwan dan berdasarkan konsep *Balance of Threat* milik Stephen M. Walt adalah *bandwagoning* terhadap Amerika Serikat.

Tiongkok tetap mempertahankan hubungan bilateralnya dengan AS dan menjaga hubungan ekonominya pada masa Pemerintahan Presiden Barack Obama meskipun Pemerintah Tiongkok dengan tegas menolak dan mengecam perdagangan senjata AS ke Taiwan. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan dari Tiongkok sendiri untuk tetap mempertahankan *status quo* nya dengan AS dan meskipun Tiongkok sering bersitegang dengan AS namun Tiongkok dirasa masih memiliki kepentingan dengan AS apalagi jika mengingat hubungan diplomatiknya telah berlangsung selama 30 tahun lebih dengan AS.

Kemudian yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah Tiongkok tidak memiliki aliansi yang mumpuni dalam melakukan *balancing* terhadap AS terutama di kawasan Asia-Pasifik. Sebagian besar negara-negara maju di Asia-Pasifik beraliansi dengan AS seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand hingga Australia. Negara-negara tersebut tersebar di kawasan Asia-Pasifik bahkan beberapa ada yang berbatasan langsung dengan Tiongkok seperti Jepang dan Korea Selatan, sehingga Tiongkok secara tidak langsung terkepung oleh aliansi AS.

Jika Tiongkok berfikir untuk melakukan *balancing* terhadap AS maka Tiongkok harus menemukan negara yang mampu menandingi power atau dengan kata lain agregat kekuatannya sama dengan AS. Namun hal tersebut dirasa tidak mungkin mengingat saingan Tiongkok merupakan negara Adidaya yang memiliki kekuatan militer terbesar di dunia dan juga memiliki aliansi dengan negara-negara besar di kawasan Asia-Pasifik sehingga pilihan untuk melakukan *balancing* adalah suatu tindakan yang irrasional bagi Tiongkok.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan mengenai Respon Tiongkok terhadap perdagangan senjata AS-Taiwan pada masa Pemerintahan Presiden Barack Obama (2009-2017) yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa Tiongkok kedepannya harus mampu mengambil keputusan yang bijak dalam mengatasi ancaman yang diberikan AS terkait hubungannya dengan Taiwan dalam perdagangan senjata. Meskipun saat ini Tiongkok belum mampu merespon secara tegas terhadap sikap yang dilakukan AS

yang dinilai tidak konsisten, namun Tiongkok memiliki kekuatan ekonomi yang mampu mengguguli AS saat ini dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung pesat sehingga hal tersebut dapat digunakan untuk mengancam balik AS.

Jika melihat dari aspek ekonomi, Tiongkok memiliki kekuatan yang lebih unggul dibanding AS sekarang, sehingga Tiongkok dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memukul mundur AS agar tidak membantu Taiwan terutama dalam menyuplai persenjataan menghadapi Tiongkok. Seharusnya Tiongkok dapat memberikan sanksi tegas seperti membekukan hubungan diplomatiknya dengan AS seperti yang dilakukan AS terhadap Tiongkok paska perang dunia II sebagai bentuk ketegasan dan juga menjadi pertimbangan AS untuk tidak mengintervensi masalah reunifikasinya dengan Taiwan. Kemudian yang terakhir penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang kembali meneliti isu ini terutama menganalisis sikap Tiongkok terhadap AS yang cenderung lunak menanggapi isu ini dan melanggar *One China Policy* sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat digunakan untuk kepentingan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Creswell, J., W., 2012, *Research design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*; Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Departemen Pendidikan, edisi ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005),
- Mann,Jim . 1999. *About Face: A History of America's Curious Relationship with China from Nixon to Clinton*. New York: Alfred A. Knopf
- Neuman, W. 2014, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson, Essex, UK.
- Subandi,Ahmad. *Psikologi Sosial*, cet. ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982)
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Walt, Stephen. *Origin of Alliance*. Copyright 1987 by Cornell University
- Waltz. Kenneth N, *Theory of International Politics*, (Reading: Addison –Wesley, 1979),

JURNAL :

- deLisle,Jaques.2010. “*Soft Power in A Hard Place: China, Taiwan, Cross-Strait Relations and U.S. Policy*” Elsevier Inc. Vol.54, No.4
- Maher,Richard.2018.” *Bipolarity and the Future of U.S.-China Relations*” . Political Science Quarterly .Vol.133 No.3
- Stephen M Waltz, 1985, *Alliances Formation and the Balance of World Power, International Security* , Vol. 9, No.4 (Sprinveg)

- Wang,Vincent Wei-cheng. 2015. “*The U.S Asia ReBalancing and the Taiwan Strait Rapprochment*”. Elsevier Inc. Vol.59, No.3
- Wang,Vincent Wei-cheng. 2016 “*Prospect for U.S.-Taiwan Relations*”.Elsevier Inc. Vol.60, No.4
- Wang, Yuan-kang.2013.” *Taiwan Public Opinion on Cross-Strait Security Issues : Implications for US Foreign Policy*” . Studies Quarterly, Vol. 7, No. 2
- Xie,Hao. 2014 “*The Impact of Taiwan Issue on Sino-US Relations*”. Open Journal of Political Science Vol,4. No.4
- Yeisley,O Mark. 2011. “*Bipolarity, Proxy Wars, and the Rise of China*” Strategic Studies Quarterly. Vol.5, No.4
- Cohen.Warren, 1993, The Cambridge History of American foreign Relations Vol IV, America in the Age of Soviet Power 1945-1991, New York; Cambridge university Press,
- Huan,Guocang. China Open Door Policy, 1978-1984. Vol. 39, No. 2, CHINA IN TRANSITION (WINTER 1986), pp. 1-18

SITUS RESMI :

- Arms Trade Treaty* Pasal 2(1) pdf, <http://static.un.org/disarmament/ATT/> diakses pada 20 november 2018
- ATT Implementation Toolkit*, <http://static.un.org/disarmament/ATT/> diakses pada 20 november 2018
- China-Taiwan Relation*, <https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations> diakses pada 9 juli 2019
- China Military Expenditure, <https://tradingeconomics.com/china/military-expenditure> diakses pada 20 April 2019
- DoD Personnel, Workforce Reports & Publications di akses melalui https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/dwp_reports.jsp pada 29 April 2019
- Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Volume XVII, China, 1969–1972. 203. Joint Statement Following Discussions With Leaders of the People’s Republic of China. Office of the Historian.*

<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v17/d203> di akses pada 10 november 2018

Intervensi Amerika Serikat dalam Perang Korea, <http://ir.binus.ac.id/2018/12/06/intervensi-amerika-serikat-dalam-perang-korea/#> pada 9 Juli 2019

Korean War Breaks Out, <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china> diakses pada 8 april 2019

SIPRI Arms Industry Database <https://sipri.org/search/node?keys=definition+Arms+sales> diakses pada 6 desember 2018

SIPRI Yearbook 2018, <https://sipri.org/yearbook/summaries> diakses pada 20 November 2018

Taiwan History di akses melalui https://www.taiwan.gov.tw/content_3.php diakses pada 7 juli 2019

The Taiwan Strait Crisis, <https://history.state.gov/milestones/1953-1960/taiwan-strait-crises> diakses pada 9 juli 2019

The United States and Taiwan's Defense Transformation, <https://www.brookings.edu/opinions/the-united-states-and-taiwans-defense-transformation/> diakses pada 8 Apr 2019

The One-China Principle and the Taiwan Issue di akses melalui <http://www.china.org.cn/english/7956.htm> diakses pada 8 April 2019

Trade, Faith, and Freedom: The Foundations of U.S. Relations with China. Di akses melalui <https://www.heritage.org/asia/report/the-complicated-history-us-relations-china> diakses pada 9 April 2019

Taiwan Relations Act: Public Law 96-8, 96th Congress, January 1, 1979 diakses melalui http://www.ait.org.tw/en/about_ait/tra/ diakses pada 8 April 2019

United States Department of State. Historical Office. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. (1957), American foreign policy. 1950–1955 brief documents., <https://www.revolvy.com/page/Sino%252DAmerican-Mutual-Defense-Treaty> diakses 10 november 2018

U.S.-China Relations: A Brief Historical Perspective, A Report by the U.S.-China Policy Foundation (2014), uscpf.org/v3/wp-

content/uploads/2014/08/backgrounder-on-US-China-relations.pdf. Di akses pada 9 April 2019

U.S.-China Relations Since 1949,
http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1950_us_china.htm diakses pada 8 April 2019

U.S.-China Trade Timeline Since 1784-2008 di akses melalui
<https://worldview.stratfor.com/article/us-china-trade-timeline-1784-2008>
pada 10 april 2019

BERITA INTERNET :

Arms Sales to Taiwan Will Proceed, U.S. Says diakses melalui
<https://www.nytimes.com/2009/12/16/world/asia/16taiwan.html> pada 20 juli 2019

<https://internasional.kompas.com/read/2011/09/27/14125032/china.cemaskan.transaksi.senjata.as-taiwan> diakses pada 30 Oktober 2018

http://internasional.tvone.co.id/berita/view/34677/2010/03/19/abaikan_china_as_tetap_jual_senjata_ke_taiwan/. Diakses pada 20 november 2018

China steps up condemnation of U.S. over Taiwan arms diakses melalui
<https://www.reuters.com/article/us-usa-taiwan/china-steps-up-condemnation-of-u-s-over-taiwan-arms-idUSTRE78L6SU20110922> pada 20 juli 2019

Diplomasi Pingpong, Ketidaksengajaan yang Cairkan Hubungan AS – China di akses melalui
[https://www.liputan6.com/global/read/3937327/10-4-1971-diplomasi-pingpong-ketidaksengajaan3\2\]1-yang-cairkan-hubungan-as-china](https://www.liputan6.com/global/read/3937327/10-4-1971-diplomasi-pingpong-ketidaksengajaan3\2]1-yang-cairkan-hubungan-as-china)
pada 9 april 2019

Heritage. President reagents six assurances Taiwan and their meaning today.
<https://www.heritage.org/asia/report/president-reagans-sixassurances-taiwan-and-their-meaning-today>. diakses pada 8 Apr 2019

MFA, 2010. Vice Foreign Minister He Yafei Made Stern Representations to the US Ambassador to China on the US Arms Sales to Taiwan di akses melalui
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wshd_665389/t655095.shtml
pada 10 mei 2019

Statement On Bilateral Meeting With President Hu Of China di akses melalui <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/statement-bilateral-meeting-with-president-hu-china>

U.S.–China Strategic and Economic Dialogue to be Held July 27-28, 2009 in Washington, D.C Di akses melalui <http://www.ustreas.gov/initiatives/us-china/> pada 1 agustus 2019

REPORT :

Mark Bromley, dkk. “Recent Trends In The Arm Transfer”, SIPRI Background Paper, April 2009

Mark E. Manyin et al., “*Pivot to the Pacific? The Obama Administration's 'Rebalancing' Toward Asia*,” Congressional Research Service, March 28 2012

Kan. A. Shirley, "China/Taiwan: Evolution of the 'One China' Policy-Key Statements from Washington, Beijing and Taipei," Congressional Research Service *Report for Congress*, September 7, 2006

Kan. A. Shirley, 2014, U.S.-Taiwan Relationship: Overview of Policy Issues, Washington : Congressional research service

Kan, A. Sherly. “Taiwan: Major U.S. Arms Sales Since 1990” *Congressional Research Service Report for Congress. August 29, 2014.*

Kerry Dumbaugh, Taiwan: Texts of the Taiwan Relations Act, the U.S. - China Communiques, and the "Six Assurances", Congressional Research Service

Lawrence,Susan.V, 2013, U.S.-China Relations: An Overview of Policy Issues, Washington : Congressional Research Service

James C. P. Chang, U.S Policy Toward Taiwan, <http://www.wcfia.harvard.edu/fellows/papers/200001/chang.pdf>, diakses tanggal 29 oktober 2018

TESIS :

Tomzak.Annika, 2016, Thesis “U.S.-China Relations, 2001-2015: Economic Interdependence and the Taiwan Issue”, Development and International Relations, Chinese Area Studies , Aalborg University, Denmark